



**Dinas Kebudayaan
Provinsi Kepulauan Riau**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah **LAKIP 2025**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya maka laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 dapat disusun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. LKIP Dinas Kebudayaan Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang di percayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (Disclosure) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Tanjungpinang, Februari 2023
Kepala Dinas Kebudayaan
Provinsi Kepulauan Riau



HERY ANDRIANTO, SE., MM.
Pemimpin Utama Utama
NIP. 197206192006042004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Struktur Organisasi	2
1.2. Fungsi dan Tugas	3
1.3. Kepegawaian	4
1.4. Sarana dan Prasarana Pendukung	6
1.5. Keuangan	7
1.6. Isu Strategis yang dihadapi Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau	8
1.7. Sistematika Pembahasan	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
2.1. Perencanaan Strategis	10
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2019	14
2.3. Rencana Anggaran Tahun 2019	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
3.1. Capaian Kinerja	17
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis Nilai Ekonomi Budaya	19
Nilai Kepresidenan Budaya	20
Nilai Warisan Budaya	24
3.3. Akuntabilitas Keuangan	27

Lampiran

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Perincian ASN Dinas Kebudayaan Prov. Kepri berdasarkan Jenis Kelamin	4
Tabel 1.2	Perincian ASN Dinas Kebudayaan Prov. Kepri Berdasarkan Tingkat Pendidikan	5
Tabel 1.3	Perincian Sarana dan Prasarana Dinas Kebudayaan Prov. Kepri Tahun 2025	6
Tabel 1.4	Anggaran dan Realisasi keuangan Tahun 2025	7
Tabel 2.1	Sasaran Strategis Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau	12
Tabel 2.2	Perjanjian kinerja tahun 2025	14
Tabel 3.1	Skala Pengukuran capaian sasaran Kinerja Tahun 2025	17
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Tahun 2025 Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau: Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025 ..	18
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Dimensi Ekonomi Budaya dari tahun sebelumnya	19
Tabel 3.4	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Dimensi Ekonomi Budaya dari tahun yang dinilai dengan target akhir Renstra	20
Tabel 3.5	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Dimensi Ekonomi Budaya realisasi kinerja tahun yang dinilai dengan standar nasional	21
Tabel 3.6	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja penduduk usia 15 thn keatas sebagai pendukung pelaku yang dijadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan	22
Tabel 3.7	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Nilai Ekspresi Budaya dari tahun sebelumnya	26
Tabel 3.8	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Dimensi Ekspresi Budaya dari tahun yang dinilai dengan target akhir Renstra;	27
Tabel 3.9	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Nilai Ekspresi Budaya realisasi kinerja tahun yang dinilai dengan standar nasional	28
Tabel 3.10	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Perentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku atau pendukung pertunjukan seni	30
Tabel 3.11	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Nilai Warisan Budaya dari tahun sebelumnya	34
Tabel 3.12	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Nilai Warisan Budaya dari tahun yang dinilai dengan target akhir Renstra	36



Tabel 3.13	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Nilai Warisan Budaya realisasi kinerja tahun yang dinilai dengan standar nasional	37
Tabel 3.14	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	38
Tabel 3.15	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase cagar budaya yang dilestarikan	41
Tabel 3.16	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	43
Tabel 3.17	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	43
Tabel 3.18	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Peningkatan kompetensi SDM Sejarah	47
Tabel 3.19	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase peningkatan kesadaran usia Pelajar Tingkat SLTA sederajat tentang sejarah lokal	48
Tabel 3.20	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah/cagar budaya yang ditetapkan	49
Tabel 3.21	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase peningkatan upaya konservasi koleksi museum setiap tahun	53
Tabel 3.22	Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2022	58



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan kebudayaan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau dan RENSTRA Tahun 2023-2030 serta selaras dengan kebijakan nasional penguatan kebudayaan.

Pada Tahun Anggaran 2023, Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan program dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan daerah, dengan fokus pada penguatan dimensi warisan budaya, ekspresi budaya, dan ekonomi budaya. Seluruh pelaksanaan program didasarkan pada prinsip akuntabilitas kinerja, efektivitas pemanfaatan sumber daya, serta peningkatan kualitas layanan publik di bidang kebudayaan.

Secara umum, capaian kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 menunjukkan hasil yang baik, tercermin dari sebagian besar indikator kinerja utama yang mencapai atau mendekati target yang telah ditetapkan. Capaian ini didukung oleh peningkatan koordinasi lintas sektor, optimalisasi perencanaan berbasis kinerja, serta



pelaksanaan program yang lebih terarah sesuai kebutuhan daerah dan karakteristik kebudayaan Kepulauan Riau.

Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target optimal. Kondisi tersebut antara lain dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya pendukung, dinamika kebijakan, perbedaan karakteristik dan skala indikator nasional dan daerah, serta tantangan geografi wilayah kepulauan. Atas kondisi tersebut, Dinas Kebudayaan telah merumuskan berbagai langkah perbaikan melalui penguatan perencanaan, peningkatan kualitas data dan indikator kinerja, serta optimalisasi sinergi dengan pemangku kepentingan terkait.

Dari sisi pengelolaan anggaran, pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 telah dilaksanakan secara efisien dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemanfaatan anggaran diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis secara langsung serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja kebudayaan daerah.

Melalui penyusunan LKJIP ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran bagi peningkatan kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun-tahun mendatang, sekaligus menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan strategis guna mewujudkan pembangunan kebudayaan yang berkelanjutan, berdaya saing, dan berakar pada nilai-nilai budaya Melayu Kepulauan Riau.



Isi / Isi :

1. Struktur organisasi
2. Fungsi dan tugas
3. Kepegawaian
4. Service dan Pelayanan
5. Keuangan
6. Sistem Strategi
7. Sistem etika Pembinaan

BAB I PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2004 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 93 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Kebudayaan Kepulauan Riau
2. Mendorong Dinas Kebudayaan Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Kebudayaan Kepulauan Riau dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan

3.2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-2708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, serta berdasarkan draft Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau terkait Struktur Organisasi dan Tata Kerja, maka terdapat beberapa perubahan organisasi struktur dan tata laksana baru serta tapolbi baru. Berdasarkan peraturan daerah yang lama (Perda No. 4 tahun 2011) terdapat 1 Sekretariat dan 4 (empat) bidang yaitu:

- 1) Sekretariat
- 2) Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman
- 3) Bidang Sejarah dan Tradisi
- 4) Bidang Kesenian, dan
- 5) Bidang Data dan Dokumentasi Kebudayaan

Selanjutnya ke-empat bidang tersebut diatas akan berganti menjadi 1 Sekretariat dan 4 (empat) bidang baru yaitu :

- 1) Sekretariat
- 2) Bidang Cagar Budaya;
- 3) Bidang Adat Tradisi dan Karya Budaya Tak Benda;
- 4) Bidang Sejarah dan Permuseuman,
- 5) Bidang Kesenian

OPD Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:



1.2. Fungsi dan Tugas

Dinas Kebudayaan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

Dinas Kebudayaan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Cagar Budaya, Sejarah dan permuseuman, Adat Tradisi dan Karya Budaya takbenda, Kesenian;
- pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Cagar Budaya, Sejarah dan permuseuman, Adat Tradisi dan Karya Budaya takbenda, Kesenian;

- c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Sekretariat, Cagar Budaya, Sejarah dan permuseuman, Adat Tradisi dan Karya Budaya takbenda, Kesenian;
- d) pelaksanaan administrasi dinas bidang di Sekretariat, Cagar Budaya, Sejarah dan permuseuman, Adat Tradisi dan Karya Budaya takbenda, Kesenian, dan
- e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya

1.3. Kepegawaian

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas berdasarkan struktur organisasi didukung sebanyak 6 jabatan struktural 11 Fungsional dari Penyetaraan dan fungsional Umum 2 orang. Potensi sumber daya asu Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau (tahun 2023) sebanyak sebanyak 72 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 2 (tiga) kelompok yaitu PNS (Pegawai Negeri Sipil) sebanyak 34 orang, PTT (Pegawai Tidak Tetap) sebanyak 29 orang dan TML (Tenaga Mekan Lepas) sebanyak 22 orang Untuk saat ini jumlah pegawai tersebut tergolong cukup untuk melaksanakan program dan kegiatan terkait urusan kebudayaan. Namun demikian untuk periode lima tahun ke depan sejalan dengan perkembangan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau jumlah tersebut masih kurang mencukupi. Apabila setiap pejabat struktural mempunyai 5 orang staf, maka masih dibutuhkan sebanyak 25 orang staf. Mengingat Dinas Kebudayaan Kepulauan Riau berada pada level provinsi yang harus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/ kota, maka sesungguhnya jumlah staff untuk setiap jabatan struktural harus memadai, hal ini terkait erat dengan bidang tugas yang harus ditangani oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau sangat luas. Adapun perincian jumlah aparatur sipil negara sebagai berikut:

Tabel 1.1
Perincian ASN Dinas Kebudayaan Prov. Kepri
berdasarkan Jenis Kelamin

No	Status Kepegawaian	Jml Pegawai	Jenis Kelamin	
			L	P
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	27	16	11
2	PPPK	37	22	14
	Jumlah	64	38	26

Sumber data : Disbud Provinsi Kepri, 2022

Berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar pegawai berpendidikan Sarjana (S1) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) seperti terlihat pada tabel berikut

Tabel 1.2
Perincian ASN Dinas Kebudayaan Prov. Kepri
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Status Kepegawaian	Jml Pegawai	PENDIDIKAN					
			S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP
1	Pegawai Negeri	27	2	8	12	1	1	
2	PPPK	37			14	4	16	1
	Total	64	2	8	26	5	17	1

Sumber data : Disbud Provinsi Kepri, 2022.

Berdasarkan analisis tingkat pendidikan ASN Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau sebenarnya sudah cukup memadai. Namun apabila tugas semakin meluas, maka diperlukan banyak pegawai yang mempunyai keahlian manajerial baik lulusan Sarjana (S-1) atau Magister (S-2). Mengingat kajian dan kerja bidang kebudayaan sangat luas dan selalu berkembang, maka untuk memperoleh hasil yang lebih baik, maka dibutuhkan pegawai yang mempunyai keahlian lebih di bidangnya masing-masing. Paling tidak, pada semua pejabat struktural, pendidikan lanjut (Magister/S2) dan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugas-tugasnya.

Selanjutnya dalam hal tugas-tugas yang menyangkut analisis kebudayaan dan pendapat-pendapat yang harus diberikan oleh Dinas Kebudayaan oleh pihak

lain, sekaligus untuk mengembangkan kebudayaan yang ada, dibutuhkan pegawai ahli dengan tambahan pelatihan dan diklat.

Perlunya aparatur sipil negara (ASN) meneruskan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi bagi pegawai Dinas Kebudayaan, harus memperhatikan topikal Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau. Oleh karena itu, jenis atau jurusan studi yang direkomendasikan adalah kebudayaan, sejarah, cinematografi, kemaritiman (khususnya budaya maritim). Dengan demikian secara kualitas maupun kuantitas pegawai akan sangat mendukung topikal yang diemban oleh seluruh pegawai Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau.

1.3. Sarana dan Prasarana Pendukung

Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Dinas Kebudayaan sampai dengan tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 1.3
Perincian Sarana dan Prasarana
Dinas Kebudayaan Prov. Kepri Tahun 2022

No	Nama barang	Satuan	Jumlah
A	Gedung Perkantoran		
1.	Gedung Dinas Kebudayaan	Unit	1
2.	Gedung Lembaga Adat Melayu (LAM)	Unit	1
B	Kendaraan Bermotor		
3.	Mobil	Unit	4
4.	Sepeda Motor	Unit	6
C	Prasarana dan Sarana Kantor		
5.	Meja Kerja	Unit	82
6.	Kursi	Unit	182
7.	Lemari dan Brankas	Unit	3
8.	Lemari dan Filing Cabinet	Unit	94
9.	Lemari lainnya	Unit	10
10.	Air Conditioner dan AC Split	Unit	37
11.	Air Cooler	Unit	3
12.	LCD dan layar	Unit	4/6
13.	Televisi	Unit	6
14.	Camera	Unit	7
15.	Mandycam	Unit	4
16.	Kulkas	Unit	3
17.	Sound System	Set	1
D	Peralatan Kantor		
18.	Komputer PC	Unit	52

No	Nama barang	Satuan	Jumlah
19.	Laptop	Unit	43
20.	Printer	Unit	83
21.	UPS/power supply	Unit	27
I	Alat Musik		
23	Kelengkapan alat musik	Set	1
24	Alat Musik Melayu	Set	1
F	Benda Budaya	Set	1
G	Pakaian Tari	Staf	750

Sumber data : Disbud Provinsi Kepri, 2022

Berdasarkan sarana prasarana Dinas Kebudayaan Kepulauan Riau, maka sebenarnya masih membutuhkan gedung atau ruang yang mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan, yaitu adanya gedung arsip, dan ruang pameran. Gedung ini sangat dibutuhkan karena dalam pengembangan budaya yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan, maka gedung arsip yang menyimpan arsip budaya Melayu sangat diperlukan. Gedung Arsip dan Ruang Pamer bersama dengan Perpustakaan merupakan "jantungnya" Dinas Kebudayaan, apabila kantor ini ingin maju dengan berbagai hasil yang bermanfaat dalam pengembangan budaya Melayu. Perpustakaan harus menyimpan hasil kerja dari berbagai bidang di Dinas Kebudayaan. Hasil kajian budaya, rekaman kegiatan dan aktivitas budaya, arsip-arsip budaya, dan sumber-sumber tentang budaya khususnya Budaya Melayu, perlu dikoleksi di gedung atau ruang khusus dari Dinas Kebudayaan. Dengan demikian, visi Provinsi Kepulauan Riau yaitu "Kepulauan Riau Maju, Makmur dan Merata" benar-benar dapat diwujudkan. Kebutuhan ini tidak hanya diperuntukkan bagi pengembangan budaya bagi provinsi Kepulauan Riau saja, tetapi harus menjadi sumber informasi tentang budaya melayu bagi semua orang yang membutuhkan keterangan dan penjelasan ataupun melakukan penelitian tentang budaya melayu.

1.4 Anggaran dan Realisasi Keuangan

Pada Tahun Anggaran 2022 Dinas Kebudayaan melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp.16.222.227.226 Melalui mekanisme perubahan APBD tahun 2022 sebesar Rp 14.725.431.971 dengan rincian Belanja Operasi Rp

14.600.421.071 terdiri belanja pegawai Rp. 8.480.442.280 barang dan jasa Rp. 4.610.978.590 hibah Rp. 1.200.000.000 dan Belanja modal Rp. 122.000.000.

Anggaran dan realisasi keuangan Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 tergambar dalam tabel berikut :

Tabel 1.a
Anggaran dan Realisasi keuangan Tahun 2025

No.	Sumber Dana BL Dan BTL	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Silpa (Rp)	%
1.	APBD	14.725.421.071	14.047.867.302,31	667.554.608,69	95,47

1.6. Isu Strategis yang dihadapi Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau

Adapun Isu Strategis yang dihadapi oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :

1. Kurangnya partisipasi aktif masyarakat dan komunitas budaya dalam proses pelestarian budaya.
2. Kurangnya integrasi kebudayaan dalam sektor pendidikan, pariwisata, dan ekonomi kreatif.

1.7. Sistematika Pembahasan

Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini disajikan data kegiatan maupun sumber pembiayaan yang bersifat strategis, yaitu data kegiatan pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025. Strategis disini maksudnya adalah dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau, sementara dari sisi pembiayaan disajikan biaya yang secara langsung digunakan untuk membiayai kegiatan tidak

termasuk biaya yang bersifat penunjang. Pembebotan dibuat masih sangat terbatas hanya dengan memperhatikan kontribusi kegiatan dalam menyerap anggaran. Berdasarkan realisasi kegiatan tersebut dilakukan analisis capaian indikator dan indikator sasaran. Capaian kinerja perkegiatan sesuai data yang tersedia terbatas pada indikator input, output dan outcome.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan,

Memaparkan Profil Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Memaparkan Perencanaan Strategis Perjanjian Kinerja dan Rencana Anggaran

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Memaparkan capaian Kinerja Tahun 2022 Evaluasi dan Akuntabilitas Anggaran

Bab IV Penutup

Memaparkan hasil ringkas laporan kinerja permasalahan dan rencana aksi

Lampiran-lampiran yang mendukung penyusunan LEJIP.

1. Perencanaan Strategis
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
3. Rencana Anggaran Tahun 2023
4. Instrumen

2.1 Perencanaan Strategis

Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau merupakan manifestasi komitmen Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023-2026 sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023-2026 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2023-2026). RPJMD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan di lingkup Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023-2026 Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Kebudayaan yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkelanjutan.

2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi misi Gubernur Provinsi Kepulauan Riau dijabarkan dan dituangkan dalam tabel Visi Misi dan Sasaran Daerah sebagai berikut :

Visi	Misi	Sasaran Daerah
Kepulauan Klas Maju, Makmur dan Merata	Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional serta Ekologi dalam Membangun Pembangunan Berkeadilan.	1. Meningkatnya Penguatan Pemajuan Kebudayaan Melayu

Mengacu kepada Tujuan dan Sasaran Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah "*Meningkatnya Penguatan Pemajuan Kebudayaan Melayu Melayu*" dengan indikator capaian sasaran "*Nilai Ekonomi Budaya, Nilai Warisan Budaya, Nilai Ekspresi Budaya*"

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

► Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka menengah Dinas Kebudayaan Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau selama 5 tahun anggaran adalah: 1. *Meningkatnya Pembinaan dan Pemanfaatan Budaya Kearifan Lokal* 2. *Meningkatnya Kelestarian Kebudayaan Melayu*

> Sasaran

Sasaran menggambarkan sesuatu yang ingin dihasilkan atau dicapai Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Sasaran merupakan dasar untuk mengendalikan dan memastikan pencapaian kinerja serta untuk lebih menjamin pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh, holistik dan komprehensif. Proses Pencapaian hasil sasaran sangat tergantung dari keberhasilan implementasi kegiatan/program, dan diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat di ukur. Sasaran ditetapkan dengan makrod agar perjalanan/proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif dan efisien.

Sasaran Strategis Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Sasaran Strategis Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN
	1	2	3	4
1	Meningkatnya Pembinaan dan Pemanfaatan Budaya Kearifan Lokal	Nilai Ekonomi Budaya	%	28,22
		Nilai Ekspresi Budaya	%	1,69
2	Meningkatnya Kelestarian Kebudayaan Melayu	Nilai Warisan Budaya	%	52,34

1.1.3 Strategi, Program dan Kegiatan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi yang dijelaskan melalui tabel berikut :

NO	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pembinaan dan Pemanfaatan Budaya Kearifan Lokal	Pengembangan kesenian Tradisional	1. Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2	Meningkatnya Kelestarian Kebudayaan Melayu	Program Pengembangan Kebudayaan	1. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi 2. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
		Program Pengelolaan dan Pelestarian Cagar budaya	1. Penetapan Cagar budaya Tingkat Provinsi
		Program Pengelolaan Permuseuman	1. Pengelolaan permuseuman Provinsi

	Lokal			n satu sasaran
1	Meningkatnya Kelestarian Kehudajaan Melayu	Rp. 7.117.080.124	100	Semua belanja langsung dalam rangka mewujudkan n satu sasaran

1. Capaian Kinerja Tahun 2025
2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis
3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya
4. Rencana Anggaran

3.1 CAPAIAN KINERJA

Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi)

sesuai dengan tingkat capaian kinerja

Tabel 3.1
Skala Pengukuran capaian sasaran Kinerja Tahun 2025

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian	Skor
1	Lebih dari 100%	Sangat baik	Sangat baik
2	75% sampai 100%	Baik	Baik
3	50% sampai 75%	Cukup	Cukup
4	Kurang dari 50%	Kurang	Kurang

☛ Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Capaian Kinerja tahun 2025

Sesuai perjanjian kinerja tahun 2025, Dinas Kebudayaan menetapkan 2 (dua) Sasaran Strategis dengan 3 Indikator Kinerja sasaran yang akan dicapai pada tahun 2025 berikut tingkat ketercapaian 3 (tiga) selama tahun 2025

1. **Meningkatnya Pembinaan dan Pemanfaatan Budaya Kearifan Lokal, Ketercapaian sasaran strategis Peningkatkan kinerja dalam 1. Meningkatkan Pembinaan dan Pemanfaatan Budaya Kearifan Lokal, Provinsi Kepulauan Riau, melalui 1 (satu) indikator kinerja sasaran, yaitu**

- a. Nilai Ekonomi budaya
2. **Meningkatnya Kelestarian Kebudayaan Melayu***

Ketercapaian sasaran strategis Peningkatan kinerja dalam **Meningkatnya Kelestarian Kebudayaan Melayu** Provinsi kepulauan Riau, melalui 2 (Dua) Indikator kinerja sasaran ,yaitu

- a. Nilai Ekpresi budaya
- b. Nilai Warisan Budaya

Berikut tingkat ketercapaian indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran Peningkatan kinerja dalam Pelestarian (Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan) kebudayaan Provinsi kepulauan Riau:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2022
Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022			
		Sasaran	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Pembinaan dan Pemanfaatan Budaya Kearifan Lokal	Nilai Ekonomi Budaya	26,22	28,25	100	Sangat Baik
	Nilai Ekspresi budaya	1,69	1,71	100	Sangat Baik
Meningkatnya Kelestarian Kebudayaan Melayu	Nilai Warisan Budaya	51,34	51,94	99,24	baik

1. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Pembinaan dan Pemanfaatan Budaya Kearifan Lokal

• Nilai Ekonomi Budaya

Pada indikator kinerja sasaran 1 Strategis Meningkatnya Pembinaan dan Pemanfaatan Budaya Kearifan Lokal yaitu nilai ekonomi budaya dengan capaian kinerja 100% Capaian kinerja Dimensi Ekonomi Budaya pada tahun pelaporan menunjukkan hasil yang positif dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), target capaian dimensi ekonomi budaya sebesar 28,22, sementara realisasi yang dicapai sebesar 28,23. Dengan demikian, capaian kinerja telah melampaui target yang ditetapkan, yang mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kebudayaan, khususnya yang berkaitan dengan penguatan ekonomi berbasis budaya. Pencapaian tersebut mengindikasikan bahwa upaya pemerintah daerah dalam mendorong pemanfaatan potensi budaya sebagai sumber nilai ekonomi, seperti pengembangan pelaku ekonomi kreatif, seni pertunjukan, kriya, serta penguatan ekosistem budaya, telah berjalan dengan cukup baik dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan nilai dimensi ekonomi budaya.

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Dimensi Ekonomi Budaya dari tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja sasaran	Realisasi 2024	Realisasi 2023
1	Dimensi Ekonomi Budaya	28,23	28,22

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi Dimensi Ekonomi Budaya pada Tahun 2024 tercatat sebesar 28,23, sedangkan pada Tahun 2023 meningkat menjadi 28,22. Terjadi peningkatan kinerja sebesar 0,01 poin, yang menunjukkan adanya perbaikan kinerja secara incremental dari tahun ke tahun.

Peningkatan tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung sasaran strategis Dimensi Ekonomi Budaya pada Tahun 2024 relatif lebih efektif dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun peningkatan yang dicapai masih masih bersifat terbatas dan belum menunjukkan akselerasi yang signifikan.



Grafik diatas menunjukkan perbandingan capaian Dimensi Ekonomi Budaya antara Tahun 2024 dan Tahun 2023. Realisasi kinerja pada Tahun 2024 tercatat sebesar 28,19. Pada Tahun 2023, target kinerja ditetapkan sebesar 28,22, dan berdasarkan hasil pengukuran, realisasi yang dicapai sebesar 28,20, atau berada di atas target yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa indikator kinerja telah tercapai (100%), sehingga secara evaluatif kinerja Dimensi Ekonomi Budaya Tahun 2023 dinilai efektif. Perbandingan antar periode juga memperlihatkan adanya peningkatan kinerja secara bertahap dari tahun sebelumnya.

Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Dimensi Ekonomi Budaya dari tahun yang dinilai dengan target akhir Renstra;

No	Indikator Kinerja sasaran	Realisasi 2024		Target 2023		Capaian dengan 2024 terhadap target 2023
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Dimensi Ekonomi Budaya	28,22	28,19	28,22	28,20	99,57

Capaian kinerja Dimensi Ekonomi Budaya pada Tahun 2022 menunjukkan hasil yang positif dan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi kinerja pada Tahun 2022 tercatat sebesar 28,09, sedangkan pada Tahun 2023 target kinerja ditetapkan sebesar 28,22. Berdasarkan hasil pengukuran, realisasi yang dicapai pada Tahun 2023 sebesar 28,22, atau melampaui target yang telah ditetapkan. Dibandingkan dengan Tahun 2022, terjadi peningkatan capaian sebesar 0,06 poin, yang menunjukkan adanya perbaikan kinerja secara bertahap. Dalam perspektif evaluasi SAKIP, capaian ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Dimensi Ekonomi Budaya telah berjalan efektif, serta target kinerja yang ditetapkan bersifat realistis dan terukur. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra yang harus dicapai sebesar 28,57, realisasi Tahun 2023 masih menyisakan selisih sebesar 0,12 poin. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kinerja berada pada jalur yang tepat (*on track*), laju peningkatan capaian masih perlu dipercepat agar target akhir Renstra dapat dicapai secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan intervensi kebijakan dan program, khususnya yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap peningkatan ekonomi berbasis budaya, melalui optimalisasi sinergi lintas sektor, penguatan kapasitas pelaku ekonomi budaya, serta pemanfaatan data kinerja yang lebih komprehensif. Dengan langkah tersebut, diharapkan capaian Dimensi Ekonomi Budaya pada periode selanjutnya tidak hanya mempertahankan tren peningkatan, tetapi juga mampu menutup gap terhadap target akhir Renstra.

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Dimensi Ekonomi Budaya realisasi kinerja tahun yang dinilai dengan standar nasional

No	Indikator Kinerja sasaran	Realisasi Nasional 2022	Realisasi Kepri 2023
1	Dimensi Ekonomi Budaya	28,22	28,22

Capaian kinerja Dimensi Ekonomi Budaya Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan hasil pengukuran terakhir tercatat sebesar 28,22. Apabila dibandingkan dengan realisasi standar nasional Tahun 2022 yang mencapai 28,22, capaian Kepulauan Riau masih berada di bawah rata-rata nasional, dengan selisih sebesar 2 poin.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun Dimensi Ekonomi Budaya Kepulauan Riau telah mengalami peningkatan dan mampu memenuhi target kinerja daerah, namun secara komparatif daya saing ekonomi budaya daerah masih perlu diperkuat agar dapat sejajar dengan capaian nasional. Perbedaan ini mengindikasikan adanya

ruang perbaikan dalam optimalisasi potensi budaya sebagai sumber nilai ekonomi. Capaian ini menggambarkan bahwa outcome kebijakan telah tercapai pada level regional, namun belum sepenuhnya optimal pada level benchmarking nasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain keterbatasan skala ekonomi budaya, belum optimalnya integrasi sektor kebudayaan dengan pariwisata dan ekonomi kreatif, serta perbedaan karakteristik wilayah kepulauan yang mempengaruhi akses pasar dan efisiensi distribusi. Dengan demikian, diperlukan langkah strategis untuk memperbaiki kesenjangan terhadap standar nasional, antara lain melalui penguatan ekosistem ekonomi budaya, peningkatan kapasitas dan profesionalisme pelaku budaya, perluasan akses pasar dan promosi, serta optimalisasi kolaborasi lintas sektor. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai Dimensi Ekonomi Budaya Kepulauan Riau secara lebih signifikan dan berkelanjutan, sehingga pada periode berikutnya dapat mendekati atau melampaui capaian nasional.

Capaian kinerja Dimensi Ekonomi Budaya yang berhasil memenuhi bahkan melampaui target didukung oleh sejumlah indikator pendukung kinerja yang saling terintegrasi dan berkontribusi langsung terhadap pencapaian outcome. Indikator pendukung tersebut berperan sebagai pengungkit dalam memperkuat ekosistem ekonomi berbasis budaya di daerah yaitu **Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku atau pendukung pertunjukan seni dan menjadikan keterlibatan tersebut sebagai sumber penghasilan menunjukkan capaian yang melampaui target yang telah ditetapkan. Target kinerja tahun 2025 ditetapkan pertahun sebesar 0,15 N, sementara realisasi capaian mencapai 0,16 N, atau sebesar 0,02 poin persentase dari target. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa keterlibatan masyarakat dalam aktivitas seni pertunjukan tidak hanya bersifat partisipatif, tetapi juga telah memberikan nilai ekonomi dan berkontribusi terhadap penguatan ekonomi budaya. Hal ini menunjukkan bahwa seni pertunjukan mulai berfungsi sebagai salah satu alternatif sumber penghasilan bagi masyarakat usia produktif. Berikut perbandingan capaian indikator kinerja Program penduduk usia 15 thn keatas sebagai pendukung pelaku yang dijadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan dari Tahun 2024 sampai dengan 2025:**

Tabel 2.6 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja penduduk usia 15 thn keatas sebagai pendukung pelaku yang dijadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan

No	Indikator Kinerja Program	Realisasi 2024	Realisasi 2023
3	Persentase penduduk usia 15 thn keatas sebagai pendukung pelaku yang dijadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan	0,12	0,18



Indikator Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku atau pendukung pertunjukan seni dan menjadikan keterlibatan tersebut sebagai sumber penghasilan pada Tahun 2023 menunjukkan capaian yang melampaui target. Target kinerja yang ditetapkan sebesar 0,12 %, sementara realisasi yang

dicapai 1/6 2023 sebesar 0,18%, atau melampaui target sebesar 0,02 poin persentase. Capaian ini mencerminkan bahwa upaya penguatan peran seni pertunjukan sebagai sumber penghasilan masyarakat telah berjalan efektif. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 yang sebesar 0,12%, capaian Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,06 poin persentase. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja secara bertahap, yang mengindikasikan semakin meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan seni pertunjukan yang bernilai ekonomi. Capaian indikator tersebut didukung oleh pelaksanaan kegiatan fasilitasi pertunjukan seni, pembinaan dan pemberdayaan pelaku seni, serta dukungan terhadap penyelenggaraan kegiatan budaya yang berorientasi pada peningkatan pendapatan. Ketercapaian indikator ini menunjukkan adanya keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan outcome kinerja, serta memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian Nilai Ekonomi Budaya, tercapainya indikator ini adanya kegiatan pendukung oroscouting antar Bidang di Kebudayaan. Tercapainya indikator ini yaitu didukung pada kegiatan Seleksi Gita Bahana Tingkat Provinsi Kepulauan Riau, hibah yang di berikan ke pelaku budaya, festival gunung bintang Tahun Anggaran 2023

Program dan kegiatan serta penganggaran untuk pencapaian sasaran yang dimaksud adalah :

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Perubahan) Rp.	Realisasi Rp.	Output kegiatan	Keterkaitan output terhadap pencapaian sasaran	
						Mendukung Pencapaian	Kurang menunjang pencapaian
1	Program Pengembangan kesenian tradisional	Pembinaan Keahlian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	707.890.435,00	357.479.841,00	Jumlah pelaku budaya yang ditingkatkan	✓	

◆ Analisis Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian dimensi ekonomi budaya ini didukung oleh beberapa faktor utama, antara lain:

1. Konsistensi kebijakan dan program, terutama yang berorientasi pada pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal pada tahun 2013 Dinas kebudayaan event yang berkolaborasi dengan UMKM dengan melibatkan para pelaku budaya dalam seni pertunjukan yaitu Festival Budaya Melayu
2. Kolaborasi lintas sektor, baik dengan perangkat daerah terkait, komunitas budaya, maupun pelaku usaha budaya, yang mendorong peningkatan aktivitas ekonomi budaya pada tahun 2013 Dinas Kebudayaan melaksanakan program kegiatan yang berkolaborasi dengan biro kera dan pariwisata serta Badan Wilayah kebudayaan TKIV
3. Pemanfaatan potensi budaya lokal, yang mulai diintegrasikan dalam kegiatan pariwisata, event budaya, serta produk ekonomi kreatif
4. Dukungan anggaran dan program fasilitasi, meskipun terbatas, tetap diarahkan secara fokus pada kegiatan yang memiliki dampak ekonomi langsung bagi pelaku

budaya pada tahun 2022 Dinas Kebudayaan melalui dana hibah yang yang diberikan kepada sanggar sanggar yang sudah berbadan hukum

◊ Analisis Kegagalan/Kendala

Meskipun capaian telah melampaui target, terdapat beberapa kendala yang perlu menjadi perhatian, antara lain:

1. Peningkatan capaian yang relatif tipis, menunjukkan bahwa ruang akselerasi pertumbuhan ekonomi budaya masih cukup besar namun belum sepenuhnya dimanfaatkan.
2. Belum meratanya kapasitas pelaku ekonomi budaya, terutama dalam aspek manajemen usaha, pemasaran digital, dan akses permodalan.
3. Keterbatasan data ekonomi budaya yang mutakhir, sehingga perencanaan dan pengukuran kinerja belum sepenuhnya berbasis data yang komprehensif.
4. Dampak eksternal, seperti kondisi ekonomi makro dan perubahan pola konsumsi masyarakat, yang turut mempengaruhi daya beli terhadap produk dan jasa budaya.

◊ Solusi dan Rencana Tindak Lanjut

Sebagai upaya peningkatan kinerja ke depan, beberapa solusi strategis yang dirumuskan antara lain:

1. Penguatan kapasitas pelaku ekonomi budaya, melalui pelatihan kewirausahaan, digital marketing, dan peningkatan kualitas produk budaya.
2. Optimalisasi kolaborasi lintas sektor, khususnya dengan sektor pariwisata, UMKM, dan pendidikan, guna memperluas pasar produk budaya.
3. Penyempurnaan basis data ekonomi budaya, agar perencanaan dan evaluasi kinerja dapat dilakukan secara lebih akurat dan terukur.
4. Inovasi program berbasis budaya, yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah dan keberlanjutan ekonomi bagi pelaku budaya.
5. Peningkatan dukungan fasilitas dan promosi, baik melalui event budaya, pameran, maupun platform digital.

2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kelestarian Kebudayaan Melayu

> Nilai Ekspresi Budaya

Sasaran yang ke 2 Meningkatnya Kelestarian Kebudayaan Melayu dengan indikator utama yaitu capaian kinerja Nilai Ekspresi Budaya pada tahun pelaporan menunjukkan kinerja yang efektif dan melampaui target. Target kinerja yang ditetapkan sebesar 1,60, sementara realisasi capaian mencapai 1,71, atau sebesar 101,88% dari target. Capaian ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program dan

kegiatan pada sasaran strategis yang mendukung Dimensi Ekspresi Budaya telah berjalan sesuai dengan arah kebijakan dan memberikan outcome yang terukur. Pencapaian tersebut mencerminkan bahwa intervensi pemerintah daerah dalam penyediaan ruang, fasilitasi kegiatan, dan penguatan ekosistem ekspresi budaya mampu meningkatkan intensitas serta keberlanjutan aktivitas budaya di masyarakat.

Tabel 3.7 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Nilai Ekspresi Budaya dari tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Realisasi 2023
1	Nilai Ekspresi Budaya	1,67	1,71

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi Nilai Ekspresi Budaya pada Tahun 2024 tercatat sebesar 1,67, sedangkan pada Tahun 2023 meningkat menjadi 1,71. Terjadi peningkatan capaian sebesar 0,04 poin, yang menunjukkan adanya perbaikan kinerja secara bertahap (*incremental improvement*) antarperiode pelaporan. Dalam perspektif evaluasi SAKIP, peningkatan tersebut mencerminkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung sasaran strategis Nilai Ekspresi Budaya pada Tahun 2024 berjalan lebih efektif dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini juga mengindikasikan adanya penguatan ruang dan aktivitas ekspresi budaya, baik melalui fasilitasi kegiatan seni, peningkatan partisipasi pelaku budaya, maupun pemanfaatan ruang publik dan event budaya. Meskipun demikian, selisih peningkatan yang relatif terbatas menunjukkan bahwa dampak kebijakan terhadap peningkatan nilai Dimensi Ekspresi Budaya masih perlu dioptimalkan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan intervensi program yang lebih terarah pada peningkatan kualitas dan keberlanjutan ekspresi budaya, pemerataan fasilitasi antar-wilayah, serta penguatan sistem pendataan dan evaluasi kinerja. Secara keseluruhan, tren peningkatan realisasi Dimensi Ekspresi Budaya dari Tahun 2024 ke Tahun 2023 menunjukkan bahwa kinerja berada pada arah yang positif dan konsisten, namun tetap memerlukan strategi percepatan agar peningkatan yang dicapai dapat memberikan outcome dan dampak kebijakan yang lebih signifikan.



Grafik menunjukkan perbandingan capaian Nilai Ekpresi Budaya antara Tahun 2021 dan Tahun 2023. Realisasi pada Tahun 2021 tercatat sebesar 1,67. Pada Tahun 2023, target kinerja ditetapkan sebesar 1,69, dan realisasi yang dicapai sebesar 1,71, atau berada di atas target yang telah ditetapkan. Pola grafik memperlihatkan adanya tren peningkatan kinerja dari tahun ke tahun. Dibandingkan dengan Tahun 2021, realisasi Tahun 2023 meningkat sebesar 0,04 poin, yang menunjukkan adanya perbaikan kinerja secara bertahap (*incremental improvement*). Capaian ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan fasilitasi ekspresi budaya telah berjalan efektif, serta target kinerja telah ditetapkan secara realistis dan terukur. Grafik ini menegaskan bahwa kinerja Nilai Ekpresi Budaya berada pada arah yang positif, telah memenuhi target yang ditetapkan, dan mendukung pencapaian sasaran strategis perangkat daerah.

Tabel 3.8 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Dimensi Ekspresi Budaya dari tahun yang dinilai dengan target akhir Renstra:

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2023			Target akhir Renstra	Capaian dengan 2023 terhadap target 2023
		Target	Realisasi	Capaian		
1	Nilai Ekspresi	1,67	1,69	1,71	1,69	99,47

Berdasarkan tabel di atas Capaian kinerja Nilai Ekspresi Budaya pada Tahun 2022 menunjukkan hasil yang positif dan melampaui target. Target kinerja yang ditetapkan sebesar 1,69, sementara realisasi yang dicapai mencapai 1,71, atau telah melampaui target sebesar 0,02 poin. Capaian ini mencerminkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung ekspresi budaya telah berjalan efektif, serta target kinerja telah dirumuskan secara realistis dan terukur. Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2021 yang hanya sebesar 1,67, realisasi Tahun 2022 menunjukkan peningkatan sebesar 0,04 poin. Peningkatan ini mengindikasikan adanya perbaikan kinerja secara bertahap (*incremental improvement*) antarperiode, yang mencerminkan konsistensi upaya pemerintah daerah dalam memperluas ruang ekspresi budaya serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam aktivitas budaya. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra yang harus dicapai sebesar 1,82, capaian Tahun 2022 masih menunjukkan adanya gap kinerja sebesar 0,11 poin. Kondisi ini menjadi indikasi bahwa meskipun kinerja telah berada pada tren positif dan melampaui target tahunan, masih diperlukan penguatan strategi dan peningkatan intensitas intervensi program agar akselerasi pencapaian target Renstra dapat terwujud secara optimal pada periode perencanaan selanjutnya.

Tabel 2.0 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Nilai Ekspresi Budaya realisasi kinerja tahun yang dinilai dengan standar nasional

No	Indikator Kinerja sasaran	Realisasi	Realisasi Keping
		Nasional 2022	2022
1	Nilai Ekspresi Budaya	20,82	1,71

Berdasarkan tabel di atas Realisasi Dimensi Ekspresi Budaya Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2022 tercatat sebesar 1,71. Capaian ini dinilai berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah dan dikukur sesuai dengan metodologi penghitungan yang berlaku pada tingkat daerah. Apabila dibandingkan dengan realisasi standar nasional Tahun 2022 yang mencapai 20,82, terlihat adanya perbedaan nilai yang signifikan.

Adapun angka nasional Tahun 2024 sebesar 20,42 tidak digunakan sebagai perbandingan langsung kinerja daerah, mengingat terdapat perbedaan skala pengukuran, ruang lingkup indikator, serta pendekatan metodologis antara penghitungan di tingkat nasional dan daerah. Oleh karena itu, evaluasi kinerja Dimensi Ekspresi Budaya Kepalaan Riau lebih difokuskan pada konsistensi peningkatan capaian antarperiode serta tingkat pencapaian terhadap target kinerja yang telah ditetapkan.

Dalam konteks evaluasi kinerja, perbandingan ini tidak dimaknai sebagai keteringgalan kinerja secara langsung, melainkan sebagai gambaran bahwa indikator Dimensi Ekspresi Budaya di daerah masih bersifat spesifik dan kontekstual, menyesuaikan dengan karakteristik wilayah, kapasitas lokal, serta tingkat partisipasi masyarakat budaya di Kepulauan Riau. Oleh karena itu, capaian daerah lebih tepat dinilai berdasarkan tren peningkatan kinerja dari waktu ke waktu dan tingkat pencapaian terhadap target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah. Meskipun demikian, standar nasional tersebut dapat dijadikan sebagai benchmark strategis dalam perumusan kebijakan ke depan, khususnya untuk memperkuat fasilitasi ruang ekspresi budaya, meningkatkan keterlibatan pelaku seni, serta mendorong perluasan akses masyarakat terhadap kegiatan ekspresi budaya. Dengan penguatan perencanaan berbasis outcome dan sinergi lintas sektor, diharapkan capaian Nilai Ekspresi Budaya Kepulauan Riau dapat terus meningkat dan secara bertahap mendekati standar nasional pada periode perencanaan berikutnya.

Capaian kinerja Nilai Ekspresi Budaya didukung oleh indikator program, yaitu **Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku atau pendukung pertunjukan seni**. Indikator ini berfungsi sebagai indikator antara (*intermediate outcome*) yang mencerminkan tingkat partisipasi masyarakat dalam aktivitas ekspresi budaya, khususnya pada bidang seni pertunjukan. Peningkatan nilai indikator tersebut menunjukkan bahwa akses, ruang, dan kesempatan masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan seni pertunjukan semakin terbuka. Hal ini menjadi faktor pendukung utama dalam mendorong peningkatan Nilai Ekspresi Budaya, karena keterlibatan masyarakat sebagai pelaku maupun pendukung pertunjukan seni merupakan salah satu prasyarat terwujudnya ekosistem ekspresi

budaya yang berkelanjutan, keterkaitan antara indikator program ini dengan indikator sasaran strategis menunjukkan adanya keselarasan logis antara output program dan outcome kinerja. Program dan kegiatan yang diarahkan pada fasilitasi perwujudan seni, pembinaan pelaku seni, serta penyediaan ruang ekspresi budaya telah berkontribusi terhadap meningkatnya partisipasi masyarakat, yang selanjutnya berdampak pada capaian nilai Ekspresi Budaya.

Berikut perbandingan capaian indikator kinerja Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku atau pendukung pertunjukan seni dari Tahun 2024 sampai dengan 2025:

Tabel 3.10 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku atau pendukung pertunjukan seni.

No	Indikator Kinerja Program	Realisasi 2024	Realisasi 2025
3	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku atau pendukung pertunjukan seni.	1,67	1,71



Berdasarkan tabel diatas Indikator Program Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku atau pendukung pertunjukan seni pada Tahun 2025 menunjukkan capaian yang melampaui target. Target kinerja yang ditetapkan sebesar 1,69, sementara realisasi yang dicapai sebesar 1,71, atau melebihi target sebesar 0,02 poin. Capaian ini mencerminkan bahwa pelaksanaan kegiatan pendukung ekspresi budaya telah berjalan efektif dan memberikan hasil sesuai dengan yang direncanakan. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 yang hanya sebesar 1,67, capaian Tahun

2022 mengalami peningkatan sebesar 0,04 poin. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja secara bertahap, yang sejalan dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan seni pertunjukan sebagai (pelaku maupun pendukung. Capaian indikator tersebut tidak terlepas dari pelaksanaan berbagai kegiatan di tahun 2022 yang secara langsung mendukung peningkatan keterlibatan masyarakat, antara lain fasilitasi penyelenggaraan pertunjukan seni, pembinaan dan pembudayaan pelaku seni, dukungan terhadap sanggar dan komunitas seni. Banyaknya event berakala besar, baik tingkat provinsi, kabupaten/kota, nasional hingga internasional (MTQ, STQH, Pagelaran Budaya Nusantara, Festival Budaya Melayu, Kepri International Art and Culture), Keterlibatan lintas OPD dan mitra, seperti Diptar, Kemra, BKKRN, EPE Wilayah IV, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta lembaga adat dan sanggar seni. Dominasi seni pertunjukan tradisi Melayu, terutama Tari Persembahan, Tari Kreasi Melayu Kolosal, Musik Melayu, Gharal, Silat, Maikyong, dan Sandiwara Bangtawan, ketercapaian indikator program ini menunjukkan adanya keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan capaian kinerja, serta memperkuat pencapaian Dimensi Ekspresi Budaya sebagai indikator sasaran strategis. Ke depan, diperlukan penguatan kualitas dan pemerataan pelaksanaan kegiatan agar peningkatan partisipasi masyarakat dapat terus berlanjut dan berdampak lebih signifikan terhadap capaian kinerja daerah.

- Adapun program dan kegiatan serta penganggaran untuk pencapaian sasaran yang dimaksud adalah :

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Perubahan) Rp	Realisasi Rp	Output kegiatan	Keterkaitan output terhadap pencapaian sasaran	
						Memukung Pencapaian	Kurang menunjang pencapaian

1	Program Pengembangan kebudayaan	Selektarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Listas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	2016.007.25 0,00	2017.001.006 .00	Jumlah penduduk yang terlibat/pertunjukan seni	✓	
		SUB Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pewayangan Tradisi Budaya					

◆ Analisis Efektivitas dan Faktor Keberhasilan

Efektivitas capaian kinerja Dimensi Ekspresi Budaya dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain:

1. budaya di Provinsi Kepulauan Riau relatif masih hidup dan dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat, khususnya seni pertunjukan Melayu, tradisi adat, musik, tari, sastra lisan, dan ritual budaya, ditahun yang Dinas kebudayaan berkolaborasi dengan pelaku pelaku budaya yang ada di kepulauan Riau melaksanakan program kegiatan yang menampilkan 20 kesenian tradisional Tari Kreasi Melayu Kolosal, Musik Melayu, Ghazal, Silat, Makyong, dan Sandiwara Bangsawan dengan melibatkan Komunitas/ Sanggar Seni/Paguyuban yang ada di Tanjungpinang dan sanggar sanggar kesenian yang ada di Tanjungpinang

dilaksanakan di Lapangan parkir Gedung Lembaga adat melayu pada hari Sabtu, tanggal 26 Agustus 2023.

1. Peran Komunitas dan Sanggar Seni. Keberadaan sanggar seni, komunitas budaya, dan pelaku seni yang aktif menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan ekspresi budaya. Kegiatan latihan, pertunjukan, dan partisipasi dalam berbagai event budaya menunjukkan adanya ekosistem ekspresi budaya di tingkat lokal di tahun 2023 Dinas Kebudayaan juga memberikan hibah berupa uang kepada sanggar sanggar yang sudah berbadan hukum sebagai bentuk dukungan kepada pelaku budaya untuk bisa lebih mengapresiasi dan berkreaitivitas dalam pemajuan kebudayaan.
3. Ditahun 2023 dukungan program dari Pemerintah daerah secara rutin menyelenggarakan dan memfasilitasi berbagai kegiatan seni dan budaya, seperti festival budaya, peringatan hari besar adat, dan pagelaran seni tradisional itu tidak hanya di dinas kebudayaan tetapi juga ada di pariwisata dan biro kesra

◆ Analisis Faktor Kegagalan

Meskipun capaian kinerja telah melampaui target, evaluasi kinerja menunjukkan adanya beberapa keterbatasan yang perlu mendapat perhatian, antara lain:

1. Peningkatan capaian yang masih bersifat marginal, sehingga dampak kinerja belum sepenuhnya menunjukkan akselerasi yang signifikan.
2. Belum optimalnya pemerataan pelaksanaan kegiatan ekspresi budaya, terutama di wilayah dengan keterbatasan akses sarana dan prasarana.
3. Keterbatasan dukungan infrastruktur budaya, yang mempengaruhi kualitas dan frekuensi penyelenggaraan kegiatan.
4. Sistem pendataan dan pelaporan kinerja yang belum sepenuhnya terintegrasi, sehingga berpotensi mempengaruhi akurasi pengukuran indikator.

◆ Upaya Perbaikan dan Tindak Lanjut

Sebagai bagian dari siklus peningkatan kinerja berkelanjutan, dirumuskan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

1. Penyempurnaan perencanaan berbasis kinerja, dengan penguatan keterkaitan antara indikator output dan outcome Dimensi Ekspresi Budaya.
2. Peningkatan kualitas dan pemerataan fasilitas ekspresi budaya, melalui pengembangan agenda kegiatan yang berkelanjutan dan inklusif.
3. Penguatan sarana, prasarana, dan ruang ekspresi budaya, baik melalui optimalisasi aset daerah maupun kolaborasi dengan pihak ketiga.
4. Pengembangan sistem pendataan kinerja ekspresi budaya, yang lebih akurat, terukur, dan terintegrasi sebagai dasar evaluasi kinerja.
5. Penguatan kolaborasi lintas sektor dan pemangku kepentingan, guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pencapaian sasaran strategis.

Dengan implementasi upaya perbaikan tersebut, diharapkan kinerja Nilai Ekspresi Budaya pada periode berikutnya tidak hanya memenuhi aspek capaian target, tetapi juga menunjukkan peningkatan kualitas outcome dan dampak kebijakan secara berkelanjutan sesuai prinsip akuntabilitas kinerja SAKIP.

► Nilai Warisan Budaya

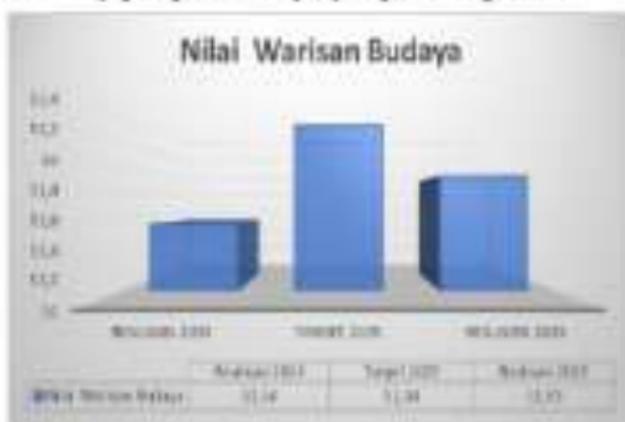
Masih pada sasaran 2 dengan indikator capaian kinerja Nilai Warisan Budaya pada tahun pelaporan belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Target kinerja Dimensi Warisan Budaya sebesar 92,34, sementara realisasi capaian mencapai 51,94, atau sebesar 56,25% dari target. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja secara umum mendekati target, namun masih terdapat selisih capaian yang perlu menjadi perhatian dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan efektivitas kinerja. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya telah berjalan, namun outcome yang dihasilkan belum sepenuhnya optimal sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan.

Tabel 2.11 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Nilai Warisan Budaya dari tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1	Nilai Warisan Budaya	92,34	51,94

Dari Tabel diatas dapat dilihat Realisasi kinerja nilai Warisan Budaya pada Tahun 2024 tercatat sebesar 51,92, mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 yang sebesar 50,54. Terjadi kenaikan capaian sebesar 0,38 poin, yang menunjukkan adanya perbaikan kinerja secara bertahap (incremental improvement) antarperiode pelaporan. Peningkatan capaian tersebut mengindikasikan bahwa program dan kegiatan perlindungan, pengembangan, serta pemanfaatan warisan budaya telah dilaksanakan secara lebih efektif dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam perspektif evaluasi SAKIP, capaian ini menunjukkan adanya kesesuaian antara perencanaan dan realisasi kinerja, serta indikasi bahwa intervensi program telah mulai memberikan dampak pada peningkatan kualitas pengelolaan warisan budaya.

Meskipun peningkatan yang terjadi relatif terbatas, tren kinerja yang positif ini mengindikasikan bahwa arah kebijakan yang ditempuh telah berada pada jalur yang tepat. Namun demikian, peningkatan capaian yang masih bersifat gradual menunjukkan perlunya penguatan kualitas program dan fokus pada outcome khususnya dalam aspek pendataan, pelestarian, dan pemanfaatan warisan budaya agar peningkatan kinerja pada periode selanjutnya dapat lebih signifikan.



Grafik memperlihatkan perbandingan capaian Dimensi Warisan Budaya antara Tahun 2024 dan Tahun 2023. Realisasi kinerja pada Tahun 2024 tercatat sebesar 51,92. Pada Tahun 2023, target kinerja ditetapkan sebesar 51,92, dan realisasi yang dicapai sebesar 52,92, atau melampaui target yang telah ditetapkan, dibandingkan dengan Tahun 2024.

realisasi Tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yang menunjukkan adanya perbaikan kinerja dan efektivitas pelaksanaan program pelindungan dan pengelolaan warisan budaya. Pencapaian yang melebihi target ini mengindikasikan bahwa intervensi program telah memberikan outcome yang lebih tinggi dari yang direncanakan.

Tabel 3.12 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Nilai Warisan Budaya dari tahun yang dinilai dengan target akhir Renstra;

No	Indikator Kinerja sasaran	Realisasi 2022			Target akhir Renstra	Capaian dengan 2022 terhadap target 2025
		Target	Realisasi	Capaian		
1	Nilai Warisan budaya	51,54	51,02	99,74	57,34	90,56

Dari tabel di atas dapat dilihat Capaian kinerja Nilai Warisan Budaya pada Tahun 2022 tercatat sebesar 51,02, dengan target yang ditetapkan sebesar 51,54. Realisasi tersebut menunjukkan bahwa capaian kinerja belum sepenuhnya memenuhi target, dengan selisih sebesar 0,39 poin. Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan pengelolaan dan pelestarian warisan budaya telah berjalan, namun hasil yang dicapai masih memerlukan penguatan agar sesuai dengan target yang direncanakan. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 yang sebesar 51,54, capaian Tahun 2022 menunjukkan peningkatan sebesar 0,39 poin. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan kinerja secara bertahap (*incremental improvement*) antarperiode, serta menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan mulai memberikan dampak terhadap peningkatan nilai warisan budaya.

Namun demikian, apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra yang harus dicapai sebesar 57,34, capaian Tahun 2022 masih menunjukkan gap kinerja yang cukup signifikan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan strategi, peningkatan efektivitas program, serta fokus pada outcome dalam pelaksanaan kegiatan pelestarian dan pemanfaatan warisan budaya agar akselerasi pencapaian target Renstra dapat terwujud secara optimal pada periode perencanaan selanjutnya.

Tabel 2.12 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Nilai Warisan Budaya realisasi kinerja tahun yang dinilai dengan standar nasional

No	Indikator Kinerja daerah	Realisasi Nasional 2024	Realisasi Kepri 2024
1	Nilai Warisan Budaya	54,93	54,93

Realisasi Nilai Warisan Budaya Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2024 tercatat sebesar 54,93, yang merupakan hasil pengukuran indikator kinerja daerah sesuai dengan definisi operasional, satuan ukur, serta metodologi penghitungan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan pengukuran kinerja daerah. Adapun realisasi standar nasional Tahun 2024 sebesar 54,93 tidak dimaknai sebagai pembandingan langsung terhadap capaian kinerja daerah, mengingat terdapat perbedaan konteks pengukuran, ruang lingkup data, serta mekanisme penghitungan antara indikator di tingkat nasional dan indikator yang digunakan pada tingkat daerah. Oleh karena itu, evaluasi kinerja Dimensi Warisan Budaya Kepulauan Riau lebih difokuskan pada pencapaian terhadap target kinerja daerah serta tren peningkatan capaian antar periode. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pengukuran kinerja telah dilakukan secara akuntabel, relevan, dan metodologis tepat, serta menghindari pembandingan yang tidak sepenuhnya sepadan. Angka nasional digunakan secara terbatas sebagai referensi kontekstual dalam perumusan kebijakan, tanpa dijadikan tolok ukur langsung penilaian kinerja.

Capaian kinerja Nilai warisan Budaya didukung oleh 8 indikator program, yaitu Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan, Persentase cagar budaya yang dilestarikan, Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan, Presentase Kesenian Tradisional yg Dilestarikan dan Dikembangkan, Persentase SDM sejarawan yang Berkompetensi, Persentase peningkatan kesadaran usia Pelajar Tingkat SLTA sederajat tentang sejarah lokal, Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah/warisan dunia, Persentase peningkatan upaya konservasi koleksi museum setiap tahun, terkait adanya penyusunan rencana ditahun 2025 periode rencana 2026-2030 indikator program yang ada di dinas kebudayaan mengalami perubahan karna di sesuaikan dengan INMEN no 2 tahun 2025 dan IKK Provinsi Kepulauan Riau.

- 2) Berikut perbandingan capaian indikator kinerja program Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan, dari Tahun 2024 sampai dengan 2025:

Tabel 3.14 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan

No	Indikator Program		Realisasi	Realisasi
	Renstra 2021-2026	Renstra 2026-2030	2024	2025
1	Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi		20,73	
2		Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan		20,76



Dari tabel diatas dapat dilihat Seiring dengan penyusunan Renstra Tahun 2026-2030, dilakukan penyesuaian indikator program guna meningkatkan keterpaduan pengukuran kinerja pengelolaan warisan budaya. Pada Renstra Tahun 2021-2026, indikator program yang digunakan adalah Persentase Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang telah ditetapkan terhadap total registrasi, dengan realisasi capaian sebesar 20,73. Dalam Renstra Tahun 2026-2030, indikator program tersebut disempurnakan menjadi Persentase Cagar Budaya dan

Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan. Perubahan indikator ini dilakukan sebagai bagian dari upaya penyalarsaan pengukuran kinerja yang lebih komprehensif, dengan menggabungkan data Cagar Budaya dan data Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) ke

dalam satu indikator terpadu. Penyesuaian tersebut berdampak pada perubahan rumus dan formula penghitungan, sehingga nilai realisasi indikator pada periode Renstra 2016–2020 tercatat sebesar 10,67. Perbedaan nilai realisasi antara kedua periode Renstra tersebut tidak mencerminkan penurunan kinerja, melainkan merupakan konsekuensi dari perubahan definisi operasional, cakupan indikator, dan formula penghitungan. Oleh karena itu, capaian indikator pada Renstra 2021–2026 dan Renstra 2026–2030 tidak diperbandingkan secara langsung, melainkan dinilai sesuai dengan konteks dan metodologi masing-masing periode perencanaan. penyesuaian indikator ini menunjukkan adanya penyempurnaan sistem pengukuran kinerja agar lebih relevan, terintegrasi, dan mencerminkan kondisi pengelolaan warisan budaya secara menyeluruh. Perubahan indikator telah dilakukan secara terencana dan terdokumentasi dalam dokumen Renstra, sehingga tetap memenuhi prinsip akuntabilitas, konsistensi, dan keterukuran kinerja. Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator Pertentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan untuk WBTB Realisasi adalah penetapan Warisan Budaya Tak Benda (WBTb) sebagai WBTb Indonesia dengan target 2 WBTb capaian indikator sebanyak 14 WBTb yang ditetapkan sebagai WBTb Indonesia. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya strategis dalam memperkuat perlindungan, pengakuan, dan legitimasi formal terhadap warisan budaya daerah pada tingkat nasional. Pelaksanaan kegiatan penetapan WBTb sebagai WBTb Indonesia mencakup proses inventarisasi, pendokumentasian, verifikasi, serta pengajuan kepada pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Output dari kegiatan ini berupa bertambahnya jumlah WBTb yang ditetapkan secara nasional, yang secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan nilai indikator penetapan warisan budaya. kegiatan ini memiliki keterkaitan yang jelas antara output kegiatan dan outcome indikator program, di mana penetapan WBTb sebagai WBTb Indonesia menjadi faktor kunci dalam meningkatkan persentase warisan budaya yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kegiatan ini berperan sebagai pengungkit kinerja (*performance driver*) dalam mendukung capaian Nilai Warisan Budaya. Ke depan, penguatan kualitas usulan, kelengkapan dokumen, serta koordinasi lintas sektor dan dengan pemerintah pusat perlu terus dilakukan agar efektivitas kegiatan penetapan WBTb sebagai WBTb Indonesia dapat semakin optimal dan berkelanjutan.

Pelaksanaan kegiatan penetapan Cagar Budaya pada periode pelaporan belum dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan. Target sub kegiatan penetapan Cagar Budaya sebesar 1 penetapan Cagar budaya, namun realisasi yang dicapai sebesar 0 dengan pagu yang di alokasi untuk penetapan cagar budaya hanya untuk perpanjangan sertifikasi Tim Ahli Cagar budaya sebanyak 7 orang. Kondisi ini disebabkan oleh keterbatasan alokasi anggaran yang tersedia, sehingga belum memungkinkan dilaksanakannya seluruh tahapan penetapan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses penetapan Cagar Budaya memerlukan tahapan teknis yang kompleksif, antara lain kajian tim ahli, pendokumentasian, verifikasi lapangan, serta penetapan melalui mekanisme yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Keterbatasan anggaran berdampak pada belum terpenuhinya kebutuhan pembiayaan untuk melaksanakan tahapan tersebut secara optimal. Ke depan, diperlukan penyusunan perencanaan anggaran, penguatan prioritas program, serta sinergi pendanaan agar target penetapan Cagar Budaya dapat direalisasikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Program dan kegiatan serta penganggaran untuk pencapaian sasaran yang dimaksud adalah :

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Perubahan) Rp.	Realisasi Rp	Output kegiatan	Keterkaitan output terhadap pencapaian sasaran	
						Memenuhi Pencapaian	Kurang memenuhi pencapaian
1	Program Pengembangan kebudayaan kebudayaan Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah	112.620.000,00	112.020.000,00	Jumlah varian budaya tak benda yang diterapkan	✓	

	Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi SUM Pelestarian, Pengembangan, Pemanfaatan Objek/Pemajuan Kebudayaan					
Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi Sub Penetapan Cagar Budaya	4.288.910,0 =	3.600.000, =	Cagar budaya yang ditetapkan tk prov	✓	

1. Berikut perbandingan capaian indikator kinerja Program Persentase cagar budaya yang dilestarikan dari Tahun 2022 sampai dengan 2023:

Tabel 3.15 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase cagar budaya yang dilestarikan

No	Indikator Program		Realisasi	Realisasi
	Renstra 2021-2026	Renstra 2026-2030	2022	2023
1	Persentase benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi		34,60	
2		Persentase cagar budaya yang		41,60

dilestarikan

Pada Renstra Tahun 2021-2026, indikator program yang digunakan adalah Persentase benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi, dengan realisasi upaian pada Tahun 2024 sebesar 34,60. Dalam Renstra Tahun 2026-2030, indikator program tersebut disesuaikan menjadi Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan. Penyesuaian indikator ini dilakukan untuk meningkatkan fokus pengukuran kinerja, tidak hanya pada aspek penetapan, tetapi juga pada aspek pelestarian cagar budaya. Perubahan indikator tersebut diikuti dengan perubahan rumus dan formula penghitungan, khususnya pada penetapan basis data cagar budaya yang digunakan. Pada penghitungan Tahun 2024, jumlah cagar budaya yang menjadi dasar perhitungan sebanyak 200 objek, sementara pada Renstra 2026-2030 ada 91 cagar budaya peringkat provinsi dikurangi dari 28 cagar budaya peringkat provinsi yang sudah di lestarikan sehingga basis data yang digunakan dibatasi pada 22 cagar budaya yang telah terverifikasi dan memenuhi kriteria pengelolaan sesuai ketentuan. Perubahan basis data tersebut berdampak pada nilai realisasi indikator pada Renstra 2026-2030 yang tercatat sebesar 42,64. Perbedaan nilai realisasi antar periode Renstra tersebut tidak dapat diperbandingkan secara langsung, karena disebabkan oleh perubahan definisi operasional, cakupan indikator, basis data, serta formula penghitungan. penyesuaian ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas pengukuran kinerja agar lebih akurat, fokus, dan relevan terhadap tujuan pengelolaan cagar budaya.

Program dan kegiatan serta penganggaran untuk pencapaian sasaran yang dimaksud adalah :

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Perubahan) Rp.	Realisasi Rp.	Output kegiatan	Keterkaitan output terhadap pencapaian sasaran	
						Menunjang Pencapaian	Kurang menunjang pencapaian

1	Program Pelestarian dan Pengelolaaan Cagar Budaya	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	104.979.162,66	106.442.606,21	Jumlah cagar budaya yang lestari	✓	10

3. Berikut perbandingan capaian indikator kinerja Program Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan dari Tahun 2004 sampai dengan 2009:

Tabel 3.16 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan

No	Indikator Program		Realisasi	Realisasi
	Renstra 2001-2006	Renstra 2006-2010	2004	2009
1	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan		0	
2		Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan		17,20



Dari tabel diatas Dalam rangka penyusunan kebijakan dan penyempurnaan sistem pengukuran kinerja pada Renstra Tahun 2006-2010, dilakukan perubahan indikator program pada urusan warisan budaya. Pada Renstra Tahun 2001-2006, indikator program Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan belum ditetapkan sebagai indikator kinerja, sehingga pada Tahun 2004

belum terdapat target maupun realisasi kinerja untuk indikator tersebut. Sejalan dengan arah kebijakan nasional dan penajaman fokus pengelolaan warisan budaya, pada Renstra Tahun 2026–2030 indikator tersebut ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Kunci (IKK), yaitu Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan. Penetapan indikator ini bertujuan untuk mengukur tidak hanya aspek penetapan warisan budaya, tetapi juga keberlanjutan upaya pelestariannya. Pada periode awal penetapan Renstra 2026–2030, realisasi indikator Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan tercatat sebesar 32,99 atau 6 WBTE yang dilestarikan. Nilai tersebut diperoleh dari perbandingan antara jumlah warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan sebagai data awal sebanyak 89 objek dengan jumlah warisan budaya yang telah dilakukan upaya pelestarian sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam indikator. Perbedaan indikator dan ketidaksi realisasi pada periode Renstra sebelumnya menyebabkan capaian kinerja indikator ini tidak dapat diperbandingkan secara langsung antarperiode, karena adanya perubahan definisi operasional, cakupan pengukuran, serta formula perhitungan kinerja pada tahun 2022 ada beberapa Program kegiatan yang mendukung ketepatan indikator ini Melayu Berdendang Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau Ghanal, Tari, Syair Gurindam 12, Silat Pembukaan Ramadhan Fair (KURMA) Malam Ta'aruf dan Pembukaan STQH 2023 Prov. Kepulauan Riau Tari Kolosal, Ghanal, Musik, Ghanal dan Lagu Melayu. Program dan kegiatan serta penganggaran untuk pencapaian sasaran yang dimaksud adalah :

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Perubahan) Rp.	Realisasi Rp.	Output kegiatan	Keterkaitan output terhadap pencapaian sasaran	
						Memukung Pencapaian	Kurang menunjang & pencapaian
1	Program Pengembangan kebudayaan	Pelestarian Kesenian Tradisional yang MasyarakatPela	298.607.210,00	297.273.686,00	Jumlah objek warisan budaya yang	✓	

an	karya Lintas Kabupaten/Kota dan dalam Daerah/Provinsi			lestar		
	Sub Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek/Pemajuan Tradisi Budaya					

4. Berikut perbandingan capaian indikator kinerja Program Presentase Kesenian Tradisional yg Dilestarikan dan Dikembangkan dari Tahun 2024 sampai dengan 2025:

Tabel 2.17 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Presentase Kesenian Tradisional yg Dilestarikan dan Dikembangkan

No	Indikator Program		Realisasi	Realisasi
	Renstra 2021-2026	Renstra 2026-2030	2024	2025
1	Presentase Kesenian Tradisional yg Dilestarikan dan Dikembangkan		0	
2		Presentase Kesenian Tradisional yg Dilestarikan dan Dikembangkan		7,50



Dalam rangka penyediaan arah kebijakan dan penyempurnaan sistem pengukuran kinerja pada Renstra Tahun 2026-2030, dilakukan perubahan indikator program pada urusan kesenian tradisional. Pada Renstra Tahun 2021-2026, indikator program Presentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan belum ditetapkan sebagai indikator kinerja, sehingga pada Tahun 2024 belum terdapat target

menyusun realisasi kinerja untuk indikator tersebut. Sejalan dengan kebijakan nasional serta implementasi Instruksi Menteri (Inmens) No 1 tahun 2022 yang mengarahkan penguatan pelestarian dan pengembangan kesenian tradisional, pada Renstra Tahun 2026-2030 indikator Persentase Kesenian Tradisional yang Diestorikan dan Diembangkan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Kunci (IKK). Penetapan indikator ini bertujuan untuk memastikan pengukuran kinerja yang lebih terarah, terukur, dan berorientasi pada hasil pelestarian dan pengembangan kesenian tradisional secara berkelanjutan. Pada tahap awal penerapan Renstra 2026-2030, realisasi indikator tersebut tercatat sebesar 7,30 atas 20 kesenian dikembangkan pada tahun 2022. Nilai capaian ini dihitung berdasarkan data awal sebanyak 247 kesenian tradisional yang telah tercatat, yang selanjutnya dibandingkan dengan target pelestarian dan pengembangan yang ditetapkan setiap tahunnya sesuai dengan formula indikator. Program kegiatan yang menunjang kegiatan ini adalah Pagelaran Budaya Nusantara 2022 Disbud Kepulauan Riau kegiatan ini menampilkan 20 kesenian tradisional dengan melibatkan Komunitas/ Sanggar Seni/Paguyuban yang ada di Tanjungpinang dan sanggar/sanggar kesenian yang ada di Tanjungpinang dilaksanakan di Pelataran parkir Gedung Lembaga adat melayu pada hari Sabtu, tanggal 25 Agustus 2022.

Program dan kegiatan serta penganggaran untuk pencapaian sasaran yang dimaksud adalah :

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Perubahan) Rp.	Realisasi Rp.	Output kegiatan	Keterkaitan output terhadap pencapaian sasaran	
						Menunjang Pencapaian	Kurang menunjang pencapaian
1	Program Pengembangan	Pelestarian Kesenian	298.607.520,00	297.273.686,00	Jumlah objek	✓	

angan kebudaya an	Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Listas Kabupaten/Kot a dalam DaerahProvinsi Sub Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya			varian budaya yang lestari		
-------------------------	---	--	--	-------------------------------------	--	--

9. Berikut perbandingan capaian indikator kinerja Program Persentase Peningkatan kompetensi SDM Sejarah dari Tahun 2024 sampai dengan 2025:

Tabel 3.18 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Peningkatan kompetensi SDM Sejarah

No	Indikator Program		Realisasi	Realisasi
	Renstra 2021-2026	Renstra 2026-2030	2024	2025
1	Persentase SDM Sejarahwan yang berkompotensi		97,33	
2		Persentase Peningkatan kompetensi SDM Sejarah		0,00

Dari Tabel di atas Perbedaan indikator program pada urusan pembinaan sejarah terjadi seiring dengan penyusunan dokumen perencanaan antara Renstra Tahun 2021-2026

dan Renstra Tahun 2026-2030. Pada Renstra 2021-2026, indikator yang digunakan adalah Persentase SDM Sejarawan yang Berkompetensi, yang berfokus pada pengukuran tingkat kepemilikan kompetensi SDM sejarah berdasarkan status atau penguasaan kompetensi yang telah dimiliki. Sementara itu, pada Renstra 2026-2030 indikator program disempurnakan menjadi Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Sejarah, yang menekankan pada aspek proses dan hasil peningkatan kompetensi SDM sejarah dalam periode tertentu. Perubahan indikator ini memunculkan pergeseran pendekatan pengukuran kinerja dari sekadar kondisi capaian (*output/status*) menjadi pengukuran peningkatan kapasitas (*outcome*). Namun demikian, pada Tahun 2025 indikator Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Sejarah belum dapat direalisasikan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran pada program pembinaan sejarah, sehingga alokasi anggaran tidak dapat dilakukan dan kegiatan pendukung indikator tersebut tidak terlaksana. Kondisi ini berdampak langsung pada tidak tersedianya data capaian kinerja pada tahun berjalan, meskipun indikator telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Sebagai perbandingan, pada Renstra Tahun 2021-2026 indikator program yang digunakan adalah Persentase SDM Sejarawan yang Berkompetensi, dengan realisasi capaian kinerja sebesar 90,73. Perbedaan indikator antara kedua periode Renstra tersebut menyebabkan capaian kinerja tidak dapat dibandingkan secara langsung, karena terdapat perubahan pada definisi indikator, pendekatan pengukuran, serta ruang lingkup kompetensi yang dinilai.

6. Berikut perbandingan capaian indikator kinerja Program Persentase peningkatan kesadaran usia Pelajar Tingkat SLTA sederajat tentang sejarah lokal dari Tahun 2024 sampai dengan 2025:

Tabel 2.30 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase peningkatan kesadaran usia Pelajar Tingkat SLTA sederajat tentang sejarah lokal

No	Indikator Program	Realisasi	
		Renstra 2021-2026	Renstra 2026-2030
1	Indikator tidak ada	0	
2	Persentase peningkatan		0,00

kesadaran usia
Pelajar Tingkat
SLTA sederajat
tentang sejarah
lokal

Dalam rangka penyesuaian arah kebijakan dan penyempurnaan sistem pengukuran kinerja pada Renstra Tahun 2026-2030, ditetapkan indikator program Persentase Peningkatan Kesadaran Usia Pelajar Tingkat SLTA/Sederajat tentang Sejarah Lokal. Indikator ini dirancang untuk mengukur peningkatan pemahaman dan kesadaran generasi muda terhadap nilai-nilai sejarah lokal sebagai bagian dari upaya penguatan identitas dan karakter kebangsaan.

Namun demikian, pada Tahun 2023 indikator tersebut belum dapat direalisasikan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran pada program pembinaan sejarah, sehingga alokasi anggaran tidak dapat dilakukan dan kegiatan pendukung indikator tidak ada. Kondisi tersebut berdampak pada tidak tersedianya data capaian kinerja pada tahun berjalan, meskipun indikator telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

7. Berikut perbandingan capaian indikator kinerja Program Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah/cagar budaya yang ditetapkan

Tabel 3.20 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah/cagar budaya yang ditetapkan

No	Indikator Program		Realisasi	Realisasi
	Renstra 2021-2026	Renstra 2026-2030	2023	2023
1	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah/cagar budaya yang ditetapkan		16,96	
2	Persentase			18,33

Penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah dan/atau Cagar Budaya yang telah ditetapkan



Dari tabel di atas dapat dilihat Dalam rangka penyusunan kebijakan dan penguatan pengukuran kinerja pada Renstra Tahun 2016-2020, ditetapkan indikator program Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas yang Mengunjungi Peninggalan Sejarah dan/atau Cagar Budaya yang telah ditetapkan. Pada tahun pelaksanaan awal, indikator ini ditetapkan Museum Raja Afdi Haji Butem

dengan target sebesar 17,16 persen atau setara dengan 12.000 orang, dan terrealisasi sebesar 23,33 persen atau setara dengan 30.972 orang, yang menunjukkan capaian melampaui target yang telah ditetapkan. Sebagai pembandingan, pada Renstra Tahun 2011-2016 digunakan indikator dengan definisi yang sama, dengan realisasi capaian kinerja sebesar 16,01 persen. Terjadi peningkatan capaian pada periode Renstra 2016-2020 yang menunjukkan adanya pertumbuhan partisipasi masyarakat, khususnya penduduk usia 10 tahun ke atas, dalam mengunjungi peninggalan sejarah dan cagar budaya yang telah ditetapkan. capaian indikator pada Renstra 2016-2020 mencerminkan peningkatan efektivitas program pembinaan sejarah dan pemanfaatan cagar budaya. Perbedaan nilai realisasi antar periode tetap perlu dimaknai dalam konteks dinamika basis data dan pendekatan pengukuran, namun secara umum menunjukkan tren kinerja yang positif dan mendukung pencapaian sasaran program. Dalam pemenuhan capaian target persentase kunjungan penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi museum / peninggalan sejarah/warisan dunia, sub bidang permuseuman

pada tahun 2022 hanya memfokuskan pada perhitungan kunjungan ke museum dan gelar Penyangat yang merupakan kawasan cagar budaya yang sedang diusulkan menjadi warisan dunia ke UNESCO. Data kunjungan ini didapat dari:

- Museum Sultan Selaiman Badru, Tanjungpinang
- Museum Bahari Bintan, Bintan
- Museum Raja Ali Haji Batam Centre, Batam
- Museum Linggam Cahaya, Lingga
- Museum Sri Serindit, Natuna
- Pulau Penyangat

Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan permuseuman, sub bidang permuseuman melakukan kunjungan dan koordinasi ke 7 Kabupaten/Kota untuk saling memberikan informasi dan menginventarisasi terhadap koleksi museum, serta membahas minat masyarakat dalam mengunjungi tempat-tempat bersejarah dan museum. Sebagai tempat yang pernah menjadi pusat kerajaan Johor-Riau-Lingga dan merupakan jalur rempah sehingga kawasan Provinsi Kepulauan Riau memiliki banyak peninggalan sejarah. Yang mana peninggalan sejarah ini tersebar di 7 kabupaten/kota baik yang sudah terdaftar atau belum terdaftar.

Program dan kegiatan serta penganggaran untuk pencapaian sasaran yang dimaksud adalah :

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Perubahan) Rp.	Realisasi Rp.	Output kegiatan	Keterkaitan output terhadap pencapaian sasaran	
						Memang Pencapa ian	Kurang menjun g pencapai an
1	Program Pengelol aan	Pengelolaan Museum Provinsi	180.379.784 ,00	184.090.784 ,00	Jumlah penduduk yang	✓	

Pernyataan			mengunjungi tempat sejarah	
------------	--	--	----------------------------	--

6. Berikut perbandingan capaian indikator kinerja Program Persentase peningkatan upaya konservasi koleksi museum setiap tahun dari Tahun 2021 sampai dengan 2023:

Tabel 3.21 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase peningkatan upaya konservasi koleksi museum setiap tahun

No	Indikator Program		Realisasi	Realisasi
	Renstra 2021-2026	Renstra 2026-2030	2024	2023
1	Indikator tidak ada		0	
2		Persentase peningkatan upaya konservasi koleksi museum setiap tahun		12,10



Seiring dengan penyesuaian kebijakan dan penyempurnaan sistem pengukuran kinerja pada Renstra Tahun 2026-2030, ditetapkan indikator program Persentase Peningkatan Upaya Konservasi Koleksi Museum Setiap Tahun. Indikator ini dirancang untuk mengukur secara lebih spesifik dan terukur upaya perlindungan, perawatan, dan

keberlanjutan koleksi museum melalui kegiatan konservasi yang dilaksanakan secara periodik. Pada tahun pelaksanaan, indikator tersebut ditetapkan dengan target sebesar 11,14 persen atau setara dengan 200 koleksi galeri yang dilakukan konservasi, dan terrealisasi sebesar 12,10 persen atau setara dengan 300 koleksi. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan konservasi koleksi museum berjalan efektif

dan melampaui target yang telah ditetapkan. Sebagai pembandingan, pada Renstra Tahun 2021-2026 indikator Persentase Peningkatan Upaya Konservasi Koleksi Museum Setiap Tahun belum ditetapkan sebagai indikator program, sehingga tidak terdapat target maupun realisasi kinerja pada periode tersebut. Dengan demikian, capaian indikator pada Renstra 2026-2030 tidak dapat diperbandingkan secara langsung antarperiode, karena merupakan indikator baru yang diperkenalkan untuk memperkuat pengukuran kinerja pengelolaan museum. Dinas Kebudayaan memiliki 10.689 koleksi yang tersimpan dan dikelola pada galeri Dinas Kebudayaan. Koleksi tersebut terdiri atas berbagai jenis benda budaya dan sejarah yang memiliki nilai penting sebagai sumber pengetahuan, identitas budaya, serta warisan sejarah daerah. Seluruh koleksi menjadi objek pengelolaan yang memerlukan upaya perlindungan, perawatan, dan konservasi secara berkelanjutan guna menjaga kondisi fisik serta nilai informasinya. Besarnya jumlah koleksi yang dikelola menjadi dasar dalam penetapan indikator Persentase Peningkatan Upaya Konservasi Koleksi Museum Setiap Tahun, di mana kegiatan konservasi dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan prioritas kondisi koleksi dan ketersediaan sumber daya. Dengan keterbatasan anggaran dan kapasitas pelaksanaan, tidak seluruh koleksi dapat dilakukan konservasi dalam satu tahun anggaran, sehingga diperlukan perencanaan konservasi jangka menengah dan berkelanjutan Program dan kegiatan serta penganggaran untuk pencapaian sasaran yang dimaksud adalah :

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Perubahan) Rp.	Realisasi Rp.	Output kegiatan	Keterkaitan output terhadap pencapaian sasaran	
						Memenuhi Pencapaian	Kurang memenuhi pencapaian
1	Program Pengelolaan Museum Provinsi Permuseum	Pengelolaan Museum Provinsi	100.270.784 ,00	184.000.784 ,00	Jumlah penduduk yang mengunjungi	✓	

aman				ngin tempat sejarah		
------	--	--	--	---------------------------	--	--

◊ Analisis Efektivitas dan Faktor Keberhasilan Nilai Warisan Budaya

Meskipun target belum sepenuhnya tercapai, terdapat beberapa faktor yang mendukung capaian kinerja nilai Warisan Budaya, antara lain:

- ▶ **Kekayaan Warisan Budaya Melayu dan Maritim.** Provinsi Kepulauan Riau memiliki warisan budaya yang kuat dan khas, terutama budaya Melayu yang berkembang seiring sejarah maritim, perdagangan, dan kesultanan. Warisan tersebut meliputi situs sejarah, bangunan cagar budaya, tradisi khas, adat istiadat, manuskrip, serta praktik budaya masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Tahun 2015 Dinas Kebudayaan telah melakukan pelestarian cagar budaya dapur arang di kabupaten Bintan.
- ▶ **Keberadaan Objek Duga Cagar Budaya (ODCB) dan Cagar Budaya.** Terdapat sejumlah ODCB dan cagar budaya yang telah teridentifikasi di berbagai kabupaten/kota, baik berupa bangunan, struktur, situs, maupun kawasan bersejarah. Dinas Kebudayaan sendiri memiliki 10.689 koleksi yang tersimpan dan dikelola pada galeri Dinas Kebudayaan. Koleksi tersebut terdiri atas berbagai jenis benda budaya dan sejarah yang memiliki nilai penting sebagai sumber pengetahuan, identitas budaya, serta warisan sejarah daerah. Seluruh koleksi menjadi objek pengelolaan yang memerlukan upaya perlindungan, perawatan, dan konservasi secara berkelanjutan guna menjaga kondisi fisik serta nilai informasinya. Tahun 2015 Dinas Kebudayaan telah melakukan konservasi terhadap koleksi yang ada di galeri sebanyak 200 koleksi.
- ▶ **Peran Komunitas Adat dan Masyarakat Lokal.** Masyarakat adat dan komunitas lokal di Kepulauan Riau masih mempraktikkan dan menjaga tradisi serta nilai budaya secara turun-temurun. Keterlibatan komunitas ini berperan penting dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya tak benda, dengan adanya program kegiatan tahun 2015 yang mendukung terkait ketercapaian dari nilai warisan budaya yaitu pagelaran Pembukaan STQH 2015 Prov. Kepulauan Riau.

Tari Kelocal, Ghazal, Musik, Ghazal dan Lagu Melayu kegiatan ini adalah kegiatan *crosscutting* antara dinas kebudayaan dan Biro Kesra.

- ▶ **Komitmen Pemerintah dalam Pelestarian Budaya.** Adanya program dan kegiatan pelestarian warisan budaya, seperti pendataan, penetapan cagar budaya, pemeliharaan situs, serta dokumentasi budaya takbenda, adalah penetapan Warisan Budaya Tak Benda (WBtb) sebagai WBtb Indonesia dengan target 1 WBtb capaian indikator sebanyak 14 WBtb yang ditetapkan sebagai WBtb Indonesia dari total 247 wbtb yang sudah dalam pencatatan. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya strategis dalam memperkuat perlindungan, pengakuan, dan legitimasi formal terhadap warisan budaya daerah pada tingkat nasional menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya.

Faktor-faktor tersebut berkontribusi dalam menjaga stabilitas capaian kinerja meskipun belum mampu mendorong peningkatan yang signifikan.

◆ Analisis Keterbatasan dan Kegagalan Pencapaian Target

Belum tercapainya target kinerja Dimensi Warisan Budaya dipengaruhi oleh beberapa permasalahan, antara lain:

- ▶ **Belum Optimalnya Perlindungan dan Pemeliharaan Cagar Budaya.** Sebagian warisan budaya, khususnya cagar budaya fisik, belum dikelola dan dipelihara secara optimal. Keterbatasan anggaran, sumber daya manusia teknis, serta sarana pendukung menyebabkan kondisi beberapa situs dan bangunan bersejarah mengalami degradasi atau kerusakan.
- ▶ **Rendahnya Tingkat Penetapan dan Legalitas Warisan Budaya.** Masih banyak objek warisan budaya yang belum ditetapkan secara resmi sebagai cagar budaya atau warisan budaya takbenda. Keterbatasan proses kajian, administrasi, dan koordinasi antarinstansi menyebabkan capaian penetapan belum maksimal dan berdampak pada rendahnya skor indikator IPK.
- ▶ **Keterbatasan SDM Ahli dan Tenaga Teknis.** Ketersediaan tenaga ahli pelestarian budaya, seperti arkeolog, sejarawan, konservator, dan juru pelihara, masih terbatas. Kondisi ini menghambat proses identifikasi, perlindungan, pemanfaatan, dan pengembangan warisan budaya secara berkelanjutan.

- Minimnya Pemanfaatan Warisan Budaya secara Kreatif dan Ekonomis. Warisan budaya masih cenderung diposisikan sebagai objek yang dilindungi, namun belum dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan pendidikan, pariwisata budaya, dan ekonomi kreatif. Akibatnya, nilai tambah warisan budaya belum berdampak signifikan terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Permasalahan tersebut menyebabkan selisih antara target dan realisasi kinerja.

➤ **Solusi dan Rencana Tindak Lanjut (Upaya Perbaikan Berkelanjutan)**

Sebagai tindak lanjut evaluasi kinerja, dirumuskan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

1. Penguatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, dengan fokus pada kegiatan yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan Nilai Warisan Budaya.
2. Peningkatan kualitas pendataan, penetapan, dan pengelolaan warisan budaya, melalui penyusunan basis data terpadu dan pemutakhiran regulasi pendukung.
3. Optimalisasi kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan perangkat daerah terkait, akademisi, dan komunitas budaya, untuk memperluas jangkauan pelestarian.
4. Penguatan sistem monitoring dan evaluasi, guna memastikan keterkaitan yang jelas antara output kegiatan dan outcome yang diharapkan.
5. Peningkatan pemanfaatan warisan budaya secara berkelanjutan, sehingga pelestarian tidak hanya berorientasi pada perlindungan, tetapi juga pada nilai guna sosial dan ekonomi.

Dengan implementasi solusi tersebut, diharapkan capaian kinerja Nilai Warisan Budaya pada periode berikutnya dapat mencapai bahkan melampaui target, serta menunjukkan peningkatan kualitas outcome dan dampak kebijakan sesuai prinsip akuntabilitas kinerja dan perbaikan berkelanjutan dalam SAKIP.

1.4. Akuntabilitas Keuangan

Pencapaian Kinerja Dinas Kebudayaan Tahun Anggaran 2019 sebagai upaya pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan dapat terwujud dengan adanya dukungan dana sebagaimana yang tertuang dalam anggaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD-F) Perubahan Provinsi Kepulauan Riau, baik yang dialokasikan dalam anggaran kegiatan maupun rutinitas perkantoran sebagai penunjang.

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Daerah beserta instruksi, petunjuk dan pelaksanaannya sepanjang tidak bertentangan dengan makna dan substansi Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 23 tahun 2002.

Pada Tahun Anggaran 2020 Dinas Kebudayaan melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp.16.322.337.396 Melalui mekanisme perubahan APBD tahun 2020 sebesar Rp. 14.732.431.971 dengan rincian Belanja Operasi Rp. 14.600.431.971 terdiri belanja pegawai Rp. 8.489.642.280 barang dan jasa Rp. 4.610.978.990 hibah Rp. 1.500.000.000 dan Belanja modal Rp. 125.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 14.027.867.262 (95,27%).

Realisasi anggaran Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan akhir Tahun Anggaran berjalan mencapai 92,27%. Persentase tersebut belum mencapai 100% disebabkan oleh adanya kebijakan pengendalian kas dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) berupa penahanan (hold) terhadap belanja kegiatan yang belum terealisasi sampai dengan Triwulan IV. Kebijakan tersebut diterapkan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas kas daerah serta memastikan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, beberapa kegiatan yang secara substansi telah direncanakan namun belum dapat dilaksanakan hingga Triwulan IV tidak dapat direalisasikan pembayarannya, sehingga berdampak pada sisa anggaran yang tidak tercapai secara penuh.

Meskipun demikian, pelaksanaan anggaran secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip akuntabilitas, serta realisasi anggaran sebesar 92,27% mencerminkan kinerja pengelolaan keuangan yang efektif dan terukur.

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2023 telah menampak.

Efektivitas dan efisiensi sumber daya anggaran dapat tercapai karena hal tersebut didukung oleh faktor-faktor sebagai berikut :

Efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya anggaran pada Tahun Anggaran 2023 dapat tercapai karena didukung oleh beberapa faktor utama. Pertama, adanya penyesuaian anggaran melalui mekanisme Perubahan APBD dari anggaran murni sebesar Rp16.333.337.398 menjadi Rp14.743.421.974, yang dilakukan secara selektif dengan tetap menjaga keberlanjutan program prioritas. Kedua, komposisi belanja yang proporsional, di mana Belanja Operasi sebesar Rp14.800.421.974 dialokasikan untuk kebutuhan yang langsung mendukung pelaksanaan program, terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp4.469.443.280, belanja barang dan jasa sebesar Rp4.610.074.300,2, serta belanja hibah sebesar Rp5.720.904.394. Ketiga, pengendalian Belanja Modal sebesar Rp123.000.000 yang diarahkan hanya pada kebutuhan sarana prasarana esensial. Faktor-faktor tersebut menunjukkan pengelolaan anggaran yang berorientasi pada prioritas, pengendalian belanja, dan optimalisasi sumber daya, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan efektif dan efisien sesuai prinsip akuntabilitas kinerja SAKIP. Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran Esajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.22

Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2023

No	Sasaran/strategis	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Realisasi %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Pembinaan	Persentase penduduk yang pernah	0,12	0,18	150	717.8004	2187.4708	304,82
						28	41	

an dan Pemanfaatan Budaya Kearifan Lokal	terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap masyarakat ts tahun ke atas)						
2 Meningkatkan Kelestarian Kebudayaan Melayu	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	1,69	1,71	100	1.048.438.401	1.021.024.700	97,46
	Persentase Warisan Budaya yang Diasterikan	11,84	12,59	126			
	Presentase Kerajinan Tradisional yang Diasterikan dan Dikembangkan	7,30	7,30	100	298.607.100	297.273.600	99,55
	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	6,94	10,76	125	218.476.100	217.350.000	99,48

Perentase cagar budaya yang dilestarikan	42,2	42,62	96	130.000,0	130.002,2	99,10
Perentase Penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjung di peninggalan sejarah dan aset Cagar budaya yang telah Diterapkan	17,2	18,22	106	190.279,7	184.030,7	96,17
Perentase peningkatan upaya konservasi koleksi museum setiap tahun	11,14	12,10	109	84,00	84,00	
Perentase Peningkatan kompetensi SDM Sejarah	0	0	0	0	0	0
Perentase peningkatan kesadaran usia Pelajar Tingkat SLTA sederajat tentang sejarah lokal	0	0	0	0	0	0

Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan ini terkait Penyerapan anggaran belanja langsung dalam pencapaian sasaran strategis pada tahun 2022

sebesar 94,89 % (Rp 2.080.007,706) dari total anggaran (Rp 2.022.870,700) terdapat 2 program 7 kegiatan 12 sub kegiatan yang mendukung indikator indeks pembangunan kebudayaan, ada 2 indikator yang tidak dapat terlaksana yaitu peningkatan kompetensi SDM Sejarah dan persentase peningkatan kesadaran usia pelajar Tingkat SLTA sederajat tentang sejarah lokal dikarenakan program kegiatan yang mendukung indikator ini tidak ada, pada Program Pengembangan Kesenian Tradisional yang merupakan program pendukung dimensi ekonomi budaya masih perlu di tingkatkan karena untuk ekonomi budaya masih cenderung rendah capaian nya ini berpengaruh besar terhadap capaian kinerja Dinas kebudayaan, kendala terkait dengan realisasi sebesar 94,89 % ini dikarenakan:

1. Bidang kebudayaan sering mendapatkan porsi anggaran yang relatif kecil dalam APBD dibanding uraian lain, padahal pencapaian dalam IPK yang dijabarkan dalam bentuk indikator Nilai nilai warisan membutuhkan dukungan pendanaan yang cukup untuk kegiatan pelestarian, ekspresi, hingga ekonomi budaya. Ini menghambat program-program strategis yang berdampak langsung pada nilai IPK.
2. Sering terjadi ketidaksesuaian antara rencana akhir penggunaan anggaran dengan realisasinya, baik karena revisi APBD, keterlambatan penyetoran DPA, atau penggeseran dana ke program lain. Hal ini membuat realisasi keuangan untuk kegiatan kebudayaan tidak optimal.
3. Dalam praktik pengelolaan anggaran di level daerah, termasuk di Kepri, terdapat fenomena serapan anggaran yang rendah di awal tahun anggaran karena perencanaan kegiatan belum matang, dokumen pengadaan terlambat, atau proses administrasi yang panjang.
4. Di tengah tekanan efisiensi dan penggeseran prioritas ke isu-isu pembangunan lain seperti infrastruktur atau pelayanan dasar, anggaran kebudayaan sering tidak menjadi prioritas utama meskipun memiliki dampak jangka panjang terhadap pembangunan sosial dan identitas budaya.
5. SDM yang terbatas dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran kebudayaan di OPD/instansi terkait sering menghambat proses penyusunan rencana, monitoring,

dan pertanggungjawaban keuangan. Ini juga memengaruhi kemampuan mengoptimalkan dana yang tersedia

1. Kesimpulan
2. Saran
3. Penghargaan

Secara umum Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan program dan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kebudayaan 2019 -2024. Dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja yang diinginkan.

Untuk dapat lebih meningkatkan kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau di tahun yang akan datang harus ditempuh berbagai upaya strategis guna mengantisipasi kendala dan hambatan yang dapat berpengaruh terhadap nilai capaian terhadap indikator kinerja. Upaya strategis terhadap pemecahan masalah tersebut dilakukan melalui peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran yang lebih tepat sasaran, penguatan koordinasi dan sinergi antarpemerintah daerah serta pemangku kepentingan kebudayaan, peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia aparatur, serta penyesuaian dan percepatan implementasi regulasi yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan kebudayaan. Selain itu, optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia serta penguatan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan menjadi langkah penting untuk meminimalisir kendala teknis dan administratif serta mendorong peningkatan kinerja di masa mendatang. Keberhasilan ini diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang. Guna memperbaiki proses dan kualitas pencapaian kinerja Dinas Kebudayaan dirumuskan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan program dan kegiatan agar lebih selaras dengan sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

2. Memperkuat kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia aparatur melalui pembinaan, pelatihan, dan pendampingan teknis.
3. Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan perangkat daerah terkait serta pemangku kepentingan kebudayaan guna mendukung efektivitas pelaksanaan program.
4. Melakukan penguatan dan penyesuaian regulasi yang mendukung pelaksanaan urusan kebudayaan secara berkelanjutan.
5. Mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala sebagai dasar perbaikan kinerja dan peningkatan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan.

Demiikan pemaparan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kebudayaan 2023 semoga dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak dan berguna sebagai bahan evaluasi bagi aparatur di lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau.

IV.1. Prestasi dan Penghargaan yang diperoleh di Tahun 2023

Dinas kebudayaan telah melaksanakan beberapa program kegiatan yang mendukung terwujudnya capaian kinerja. Dari beberapa program yang telah dilaksanakan, Dinas Kebudayaan telah mendapatkan berbagai penghargaan di tingkat nasional dan internasional tahun 2023

- Tahun 2023 ada sebanyak 14 Objek Warisan Budaya Tak benda Kepulauan Riau yang ditetapkan menjadi Warisan Budaya Takbenda Indonesia. Adapun 14 WBTB yang telah ditetapkan tersebut sebagai berikut:

1. Akitah Tanjungpinang
2. Asakona Tanjungpinang
3. Upacara Pijak Tanah Mekah
4. Madrah natuna
5. nyulon Natuna
6. Tari Tapeng Bungaran
7. Tabal Mando Natuna
8. Tongkrah
9. Kenderi Merohom Bukit Batu

10. Tradisi Baganjal Lingga
11. Air Serebat
12. Mencaik
13. Slat Pisau Anambas

LAMPIRAN





Sertifikat

Menjadi Keahlian: *Kepala Sekolah* Indonesia dengan ini menyatakan

Aldiah Tanjung Pinang

Kata Pengantar
Pusat Kependidikan

Sebagai *Wakil Kepala Sekolah* Indonesia

Jakarta, 11 Desember 2020

Menjadi Keahlian: *Kepala Sekolah* Indonesia



[Signature]
Dr. Firdi Zam., M.Pd





Sertifikat

Menyatakan bahwa **Kuuh Tige** telah memenuhi persyaratan sebagai

Kuuh Tige

Kategori **Manula**
Peningkatan **Kepuasan Pelat**

Sebagai **Warisan Budaya Takbenda Indonesia**

Jakarta, 11 Desember 2021

Mengetahui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan



Dr. Pratiwi Zanti, M.Pd





Sertifikat

Menerang dan mengesahkan keabsahan dan keaslian

Kenduri Merohom Bukit Batu Blatan

Kabupaten Blitar
Provinsi Jawa Timur

Sebagai Warisan Budaya Indonesia

Jakarta, 15 Desember 2023
Menteri Kebudayaan, Republik Indonesia



Dr. Fadli Zon., M.Sc





Sertifikat

Menyatakan bahwa Republik Indonesia mengakui dan menghormati

Timbul Begawan Lingga

Kabupaten Lingga

Provinsi Kepulauan Riau

Sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia

Jakarta, 11 Desember 2021

Wakil Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



[Signature]
Dr. Firdausy, M.Pd





Sertifikat

Menyatakan bahwa Republik Indonesia dengan ini menyetujui

Sifat Piyau Anambas

Kabupaten Kepulauan Anambas
Provinsi Kepulauan Riau

Sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia

Jakarta, 11 Desember 2021

Mengetahui Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi,
Republik Indonesia



Dr. Pratiwi Zanti, M.Pd





Sertifikat

Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Asisten Gubernur

Kata Pengantar

Provinsi Kepulauan Riau

Sebagai Menteri Budaya Indonesia Indonesia

Jakarta, 11 Desember 2021

Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



Dr. Firdausy, M.Pd





Sertifikat

Menyertai Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Sosial Masyarakat

Upacara Pijak Tanah Mekah

Kata Pengantar
Pimpinan Kementerian Dalam

Sebagai Menteri Dalam Negeri Indonesia

Jakarta, 11 Desember 2021

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,



[Signature]
Dr. Pratiwi Zanti, M.Pd





Sertifikat

Menjadi Kelulusan Republik Indonesia dengan ini menyatakan

Nr. Serebot

Kabupaten Parigi
Provinsi Kepulauan Riau

Sebagai Mahasiswa Fakultas Tadris Pendidikan Indonesia

Jakarta, 11 Desember 2021

Menjadi Kelulusan Republik Indonesia



[Signature]
Dr. Firdaus Zaini, M.Pd





Sertifikat

Menyatakan bahwa Kepala Bimbingan dan Konseling dan Penyuluh

Memerik

Kabupaten Lampung
Provinsi Kepulauan Riau

Sebagai Wakil Bimbingan dan Konseling Indonesia

Jakarta, 11 Desember 2021

Mengetahui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan



[Signature]
Dr. Pratiwi Zanti, M.Pd





Sertifikat

Menyatakan bahwa, **Kyotaku Indira Adhiguna** telah menyelesaikan

Hadroh Natuna

Kategori **Manula**

Pendidikan **Kepalaan Kitab**

Sebagai **Wakil Majelis Ulama Indonesia Indonesia**

Jakarta, 11 Desember 2021

Mengetahui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan



[Signature]
Dr. Pratiwi Zoni, M.Pd





Sertifikat

Menyatakan bahwa: Republik Indonesia dengan ini menugaskan

Nyuhoh Natuna

Kategori: Manula
Pendidik Kependidikan II/lat

Sebagai Wakil Kepala Sekolah Jabatan Indonesia

Jakarta, 11 Desember 2021

Mengetahui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan



[Signature]
Dr. Pratiwi Zanti, M.Pd





Sertifikat

Menyatakan bahwa

Taufik Topeng Bongoran

Kategori Manula
Pendidik Pengalaman Madya

Sebagai Manula Bulatya Jabatan Indonesia

Jakarta, 11 Desember 2021

Mengetahui Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Republik Indonesia



Dr. Pratiwi Zanti, M.Pd





Sertifikat

Menyatakan bahwa **Kepala Bimbingan Belajar** dengan ini menyatakan

Tabel Mando Natuna

Kategori Manda
Peningkatan Keahlian

Sebagai Manda Bimbingan Belajar Indonesia

Jakarta, 11 Desember 2021

Mengetahui Kepala Bimbingan Belajar Indonesia,



[Signature]
Dr. Firda Zoni, M.Pd





Sertifikat

Menjadi Keanggotaan Republik Indonesia dengan taat beribadah

Tongkrah

Kabupaten Buntar
Provinsi Kalimantan Barat

Sebagai Warga Binaan Keluarga Indonesia

Jakarta, 11 Desember 2021

Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan



Dr. Firdausy, M.Pd





REKORSAK REKORSAK (A) (A) (A)
TANGGAL 15/05/2023
(REKORSAK REKORSAK (A) (A) (A))

| No | REKORSAK (A) (A) (A) |
|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | REKORSAK (A) (A) (A) |
| 2 | REKORSAK (A) (A) (A) |
| 3 | REKORSAK (A) (A) (A) |

REKORSAK (A) (A) (A)
REKORSAK (A) (A) (A)

Dr. Drs. R. H. SURAHADI SURAHADI, S.P.
REKORSAK (A) (A) (A)
REKORSAK (A) (A) (A)



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hery Andrianto, S.E., M.M.
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. Anasr Ahmad, S.E., M.M.
Jabatan : Gubernur Kepulauan Riau
selaku wakil pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan fungsi tambahan dalam mewujudkan daerah yang inovatif. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 6 Januari 2026

Pihak Kedua,
Gubernur Kepulauan Riau

H. Anasr Ahmad, S.E., M.M.

Pihak Pertama,
Plt. Kepala Dinas Kebudayaan
Provinsi Kepulauan Riau

Hery Andrianto, S.E., M.M.
Pambina Utama Madya (IV/d)
NIP 197104192006041304

**PERJANJIAN KNERJA TAHUN 2025
DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pembinaan dan Pemanfaatan Budaya Kearifan Lokal	Nilai Ekonomi Budaya (%)	28,25
2	Meningkatnya Kelustaran Kebudayaan Melayu	Nilai Warisan Budaya (%)	53,34
		Nilai Ekspresi Budaya (%)	1,73

No	Tugas Tambahan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya Inovasi Peringkat Daerah	Jumlah Inovasi yang dihasilkan	15

Program	Anggaran
1. Program Pengembangan Kebudayaan	Rp. 1.361.570.200,00
2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Rp. 1.679.066.000,00
3. Program Pembinaan Sajarah	Rp. 54.581.500,00
4. Program Restorasi Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp. 582.866.000,00
5. Program Pengelolaan Permuseuman	Rp. 30.034.176,32

Tanjungpinang, 8 Januari 2025

Pihak Kedua,
Gubernur Kepulauan Riau

H. Anas Ahmad, S.E., M.M.

Pihak Pertama,
Plt.Kepala Dinas Kebudayaan
Provinsi Kepulauan Riau

Harry Andrianto, S.E., M.M.
Pembina Utama Madya (Vid)
NP 157109192038541004



YATIRIM YERLEŞİMİNİN İZLENİMLERİ
DİĞER ÖLÇÜMLER (DİĞER ÖLÇÜMLERİNİZ)

NO	ÖLÇÜMLERİNİZ	ÖLÇÜMLERİNİZ	ÖLÇÜMLERİNİZ	ÖLÇÜMLERİNİZ	ÖLÇÜMLERİNİZ	ÖLÇÜMLERİNİZ	ÖLÇÜMLERİNİZ
1	Yatırım Yeri	100.000.000	10	100.000	100.000	100.000	100.000
2	Yatırım Yeri	100.000.000	10	100.000	100.000	100.000	100.000
3	Yatırım Yeri	100.000.000	10	100.000	100.000	100.000	100.000

NO	ÖLÇÜMLERİNİZ	ÖLÇÜMLERİNİZ	ÖLÇÜMLERİNİZ	ÖLÇÜMLERİNİZ
1	Yatırım Yeri	100.000.000	100.000.000	100.000
2	Yatırım Yeri	100.000.000	100.000.000	100.000
3	Yatırım Yeri	100.000.000	100.000.000	100.000
4	Yatırım Yeri	100.000.000	100.000.000	100.000

YATIRIM YERLEŞİMİNİN İZLENİMLERİ
DİĞER ÖLÇÜMLERİNİZ

YATIRIM YERLEŞİMİNİN İZLENİMLERİ
DİĞER ÖLÇÜMLERİNİZ

YATIRIM YERLEŞİMİNİN İZLENİMLERİ
DİĞER ÖLÇÜMLERİNİZ